



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung B.J. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ANTARA

**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL**

DENGAN

Universitas Hasanuddin

Nomor: 7/AMD/E1/KP.PTNBH/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **11 (sebelas)** bulan **Mei** tahun **2020 (dua ribu dua puluh)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prakoso** : Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung B.J. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil.,PhD** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

5. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.
14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 27/E1/KPT/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 16/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2020

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga.
3. bahwa sebagai tindaklanjut *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.

4. Bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, **wabah penyakit**, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta **adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter** yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan amandemen Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020

PASAL I

Ketentuan dalam Kontrak Penelitian Nomor 7/E1/KP.PTNBH/2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebanyak **332 (tiga ratus tiga puluh dua)** judul penelitian di lingkungan PIHAK KEDUA, yang anggarannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Informasi masing-masing judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat nama ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. jumlah dana penelitian;
 4. tata cara dan termin pembayaran;
 5. waktu pelaksanaan;
 6. batas akhir pelaporan;
 7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 8. luaran penelitian; dan
 9. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 10 Desember 2020** dokumen sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian
 2. catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. laporan akhir penelitian

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:

- a. revisi proposal penelitian
- b. catatan harian pelaksanaan penelitian
- c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- e. laporan akhir penelitian
- f. luaran penelitian

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 30.595.016.200,- (Tiga Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015.

- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp 28.789.400.300,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Rupiah)
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp 1.805.615.900,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
 - Pembayaran dana luaran tambahan Rp , - ()
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta
- (5) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pasca Doktor dibayarkan dua termin.
- (6) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.
Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima paling lambat tanggal 18 September 2020 dokumen sebagai berikut:
- laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana penelitian yang telah diberikan.
- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	: Universitas Hasanuddin
Nomor Rekening	: 432602562
Nama penerima pada rekening	: Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran
Nama Bank	: Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea
Alamat Bank	: Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea Makassar
Kota	: Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	: 00.415.588.3-801.000

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

PASAL II

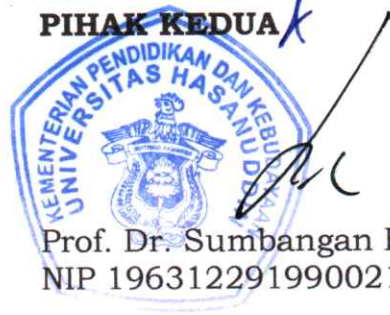
Amandemen Perjanjian Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prakoso
NIP 196602271992031003

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sumbangan Baja, M.Phil., PhD
NIP 196312291990021001

9	GUSNAWATY	ANCANGAN MODEL PEMBINAAN KESANTUNAN BERBAHASA DALAM BAHASA BUGIS BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM ERA GLOBAL		Rp. 86,534,400 (100%)	Rp.
	0031126533			Rp. 79,851,000 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 6,683,400 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
10	MUHAMMAD NUR	KONTRIBUSI PETROGLYPH SOPPENG DALAM KAJIAN PETROGLYPH ASIA TENGGARA KEPULAUAN		Rp. 120,284,200 (100%)	Rp.
	0011097006			Rp. 110,994,200 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 9,290,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
11	Badu	ANALISIS KAPABILITAS INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN		Rp. 136,812,000 (100%)	Rp.
	0031126256			Rp. 126,245,500 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 10,566,500 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
12	ST. ROHANI	MODEL SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL (TESENG) USAHA SAPI POTONG BERBASIS SOSIAL EKONOMI PETERNAK DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN		Rp. 155,283,400 (100%)	Rp.
	0022086907			Rp. 143,290,300 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 11,993,100 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
13	ROSMAWATI	Kajian Terhadap Peninggalan Budaya Islam Di Kabupaten Jeneponto Untuk Pendidikan Identitas Budaya		Rp. 67,457,900 (100%)	Rp.
	0002057206			Rp. 62,247,900 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 5,210,000 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				
14	PIPI DIANSARI	Kajian Hubungan Kondisi Sosial-Demografi dan Diversifikasi Asupan Pangan dengan Status Gizi dan Kemampuan Fisik maupun Psikomotoris Anak Usia Sekolah Dasar yang Bermukim di Kawasan Kepulauan, Pegunungan, dan Perkotaan		Rp. 78,664,700 (100%)	Rp.
	0029087505			Rp. 72,589,100 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi			Rp. 6,075,600 (Tahap II)	
	Durasi : 3 Tahun				
15	KHADIJAH THAHIR MUDA	KAJIAN KERUSAKAN DAN PELAPUKAN SITUS MAKAM KUNO RAJARAJA HADAT BANGGAE DI ONDONGAN KABUPATEN MAJENE		Rp. 98,072,800 (100%)	Rp.
	0001116508			Rp. 90,498,300 (Tahap I)	
	Penelitian Dasar			Rp. 7,574,500 (Tahap II)	
	Durasi : 2 Tahun				

KONTRAK PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 1516/UN4.22/PT.01.03/2020

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Badu, M.Si. : Ketua Pelaksana/Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Tahun Anggaran 2020 dengan judul Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 136.812.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 126.245.500,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 10.566.500,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, Catatan Harian, Luaran penelitian (output sesuai janji di kontrak) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Badu, M.Si.
Nomor Rekening :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak tanggal 18 Mei 2020 dan berakhir tanggal 10 Desember 2020.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa :
- a. Artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau
 - b. Satu buku hasil penelitian ber ISBN atau;
 - c. Tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi; atau
 - d. Tiga *book chapter* yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN.
- (2) PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian;
 - d. melakukan validasi luaran tambahan; dan
 - e. memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS **paling lambat tanggal 10 Desember 2020.**
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dan menyampaikan dokumen kepada pihak pertama berupa :
- (1) proposal
 - (2) revisi proposal penelitian;
 - (3) catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - (4) laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - (5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - (6) laporan akhir penelitian;
 - (7) luaran penelitian (output sesuai janji di kontrak).
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
- a. proposal
 - b. revisi proposal penelitian

- c. catatan harian pelaksanaan penelitian
- d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- f. laporan akhir penelitian
- g. luaran penelitian (output sesuai janji di kontrak).

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa proposal, revisi proposal penelitian, catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian; Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, laporan akhir penelitian dan luaran penelitian (output).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian diunggah ke laman SIMLITABMAS dilengkapi dengan dokumen catatan harian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama (d disesuaikan dengan SIMLITABMAS).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dana tahap pertama kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pengunggahan ke SIMLITABMAS.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah revisi proposal penelitian; catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan, laporan akhir penelitian; luaran penelitian (output) pada SIMLITABMAS paling lambat 10 Desember 2020.
- (5) Bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Laporan Hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/Ukuran kertas A4;
 - b. Warna sampul merah
 - c. Di bawah bagian cover tertulis:

Dibiayai oleh :

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran

- 1. Nomor : 7 /E1/KP.PTNBH/2020 Tanggal 18 Maret 2020 (sebelum amandemen)
- 2. Nomor: 7/AMD/E1/KP.PTNBH/2020 Tanggal 11 Mei 2020 (setelah amandemen)

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2020 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pasal 9

Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari Ketua LPPM kepada mitra penelitian yang didampingi oleh pelaksana penelitian dan foto alat/atau barang yang diserahkan ke mitra.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut diatas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahan akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA f.



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.
NIP 196201181987021001

PIHAK KEDUA

Dr. Badu, M.Si.
NIP 196212311989031028


SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua pelaksana menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Penelitian skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan Ketua Peneliti, untuk kegiatan "Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan" Nomor: 1516/UN4.22/PT.01.03/2020 Tanggal 18 Mei 2020.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 136.812.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakannya sesuai dengan peruntukannya :
 - Tahap I = Rp. 126.245.500,-
 - Tahap II = Rp. 10.566.500,-
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian yang dimaksud.
4. Menyerahkan dokumen kegiatan ke LPPM Unhas berupa :
 - a. Usulan proposal;
 - b. revisi proposal penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian;
 - g. luaran penelitian;
 - Artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi atau;
 - Satu buku hasil penelitian ber ISBN atau;
 - Tiga artikel di prosiding yang terindeks pada database bereputasi atau;
 - Tiga *book chapter* yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) diserahkan ke LPPM disesuaikan dengan jadwal di laman SIMLITABMAS.
 - Laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran penelitian (output) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah diunggah paling lambat 10 Desember 2020;
 - Laporan dan output tersebut diserahkan dan diunggah tepat waktu tanpa beralasan tidak bisa memenuhi laporan dan output penelitian akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa fungsional bilamana diperlukan.
7. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luaran penelitian serta laporan keuangan (bukti belanja dan bukti setoran pajak) secara tertib dan teratur.
8. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2020
Ketua Peneliti,


Dr. Badu, M.Si.

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 594/Ilmu Administrasi Negara/Publik
Bidang Fokus : Sosial Humaniora, Seni Budaya,
Pendidikan Desk Study Dalam Negeri

LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN
TINGGI



JUDUL PENELITIAN
ANALISIS KAPABILITAS INOVASI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI
KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

TIM PENELITIAN

Nama	NIDN	Jabatan
Dr. H. Badu, M.Si	0031126256	Ketua
Prof. Dr. H. Rakhmat, M.Si.	0020056308	Anggota
Andi Ahmad Yani, Sos., M.Si.	0023107603	Anggota

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

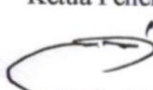
HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian: Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan	
Tema Penelitian	: Good Governance
Output Penelitian	: Jurnal Internasional Terindeks Scopus
Ketua Peneliti	:
a. Nama	: Dr. Badu, M.Si.
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki
c. NIDN	: 0031126256
d. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural	: Tidak ada
f. Fakultas/Jurusan	Fisip/Administrasi Negara
g. Telpon/E-mail	085342516246 / baduahmad7@gmail.com
Anggota Peneliti (1)	:
a. Nama Lengkap	: Prof. Dr. H. Rakhmat, M.Si.
b. NIDN / No. Telp.	0020056308 / 0811446465
Anggota Peneliti (2)	:
a. Nama Lengkap	Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.
b. NIDN / No. Telp.	0023107603 / 082292625423
Waktu Penelitian	: Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020
Biaya diusulkan	Rp 191.260.000
Biaya di Setujui	RP 136.812.000

Makassar, 07 November 2020

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Fisip,

 Prof. Dr. Armin, M.Si.
 NIP 196511091991031008

Ketua Peneliti,

 Dr. Badu, M.Si.
 NIP 196212311989031028

Menyetujui,
 Ketua LP2M Unhas,

 Prof. Dr. Andi. Alimuddin, M.Si
 NIP 196201181987021001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Penelitian:** Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan

2. Tim Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1	Dr. Badu, M.Si.	Ketua	Manajemen Publik	UNHAS	20
2	Prof. Dr. H. Rakhmat, M.Si., M.Si.	Anggota	Manajemen Publik	UNHAS	15/Minggu
3	Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si	Anggota	Administrasi Negara	UNHAS	15/Minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian:

Objek penelitian ini adalah Inovasi pemerintah di sektor pertanian yang mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan April Tahun 2020

Berakhir: Bulan Oktober 2020

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Tahun ke I : Rp 191.260.000,-

Tahun ke II : Rp 191.260.000-

Total dana yang diusulkan selama 2 (dua) Tahun sebesar Rp 382.520.000,-

6. Biaya disetujui DRPM Ditjen Penguatan Risbang, Tahun 2020 : Rp **136.812.000,-**

7. Lokasi Penelitian Lapangan: Ibu Kota Kabupaten Bantaeng, Kecamatan, dan desa

8. Instansi lain yang terlibat adalah Dinas Pertanian, Sekretariat daerah, dan Bappeda, Badan Ketahanan Pangan.

9. Temuan yang ditargetkan adalah kejelasan teori, metode sebagai model inovasi pemerintah daerah sektor pertanian yang memperkuat posisi manajemen public kontemporer dan new public service.

10. Kontribusi mendasar studi tentang kapabilitas inovasi pemerintah daerah terhadap manajemen public adalah akan memperkuat posisi teori-teori manajemen public kontemporer untuk diterapkan oleh para praktisi (birokrat) dalam merumuskan kebijakan publik. Kontribusi inovasi sektor pertanian berdampak pada meningkatkannya pendapatan

masyarakat dan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng dan daerah sekitarnya.

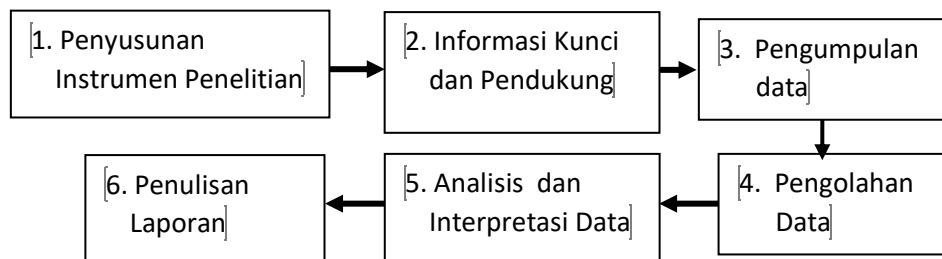
11. Rencana luaran penelitian adalah Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran adalah setiap tahun satu jurnal internasional bereputas, atau jurnal nasional terakreditasi, prosiding, book chapter, dan buku hasil penelitian.

RINGKASAN

Inovasi yang diciptakan dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan berdampak pada peningkatan penerimaan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah juga berharap inovasi sector pertanian yang berkelanjutan dan menjadi model pengembangan pertanian di Sulawesi Selatan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan petani agar mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk saat ini dan dimasa mendatang dapat dilakukan dengan inovasi sektor pertanian. Pembangunan pertanian merupakan sektor paling strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Namun inovasi tersebut mengalami hambatan untuk memaksimalkan penerapannya karena rendahnya kapabilitas masyarakat tani sehingga pola pikir petani yang sulit meninggalkan cara tradisional. Selain itu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah untuk mengoptimalkan penerapan inovasi sector pertanian di Kabupaten Bantaeng.

Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Tahun I: (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapabilitas inovasi sector pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Bantaeng; (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan inovasi sector pertanian di Kabupaten Bantaeng.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:



Hasil penelitian menunjukkan dari tiga belas inovasi yang diterapkan dalam kurun waktu sepuluh Tahun terakhir hanya agrowisata yang kurang berkontribusi dalam percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng. Kapabilitas inovasi dari indikator teknologi dan strategi sangat signifikan dalam pengembangan benih berbasis teknologi, system tanam legowo-21, dan pengembangan tanaman hortikultura dan pengolahan hasil pertanian, Sedangkan kapabilitas aparatur penyuluh dan petani cukup bersemangat dalam menjalankan program percepatan pembangunan pertanian namun tetap diperlukan pelatihan dan penambahan tenaga penyuluh. Sementara indicator pengukuran keberhasilan inovasi lebih menekankan output dari pada proses sehingga produksi mengalami pluktuasi disebabkan oleh iklim. Adapun factor pendukung kapabilitas inovasi adalah pemerintah daerah membuat inovasi asuransi usaha tanam dan asuransi usaha ternak sapi, sedangkan factor penghambat adalah petani lebih memilih bibit atau benih sendiri dibandingkan benih bersertifikat yang menjamin produktivitas yang lebih tinggi, dan keterampilan petani

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Inovasi pemerintah daerah mampu mendorong daya saing antar wilayah dan daerah. Inovasi yang sukses merupakan salah satu indikator kinerja dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia. Kapabilitas inovasi pemerintah daerah di sektor pertanian harus dicermati penerapan dan keberlanjutannya karena dipengaruhi langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan hasil penelitian Badu (2017 dan 2018) bahwa tingginya kinerja pemerintah di daerah disebabkan oleh penerapan inovasi pelayanan public yang mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus berinovasi di sektor pertanian karena memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah serta dapat meningkatkan perkapita dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah terus menggairahkan petani melalui pembimbingan sendiri. Bitit bawang, kentang, jagung, pupuk, air untuk instalasi ke kebun-kebun disiapkan oleh pemerintah sehingga kebutuhan air bisa diatur sepanjang tahun. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bantaeng meraih penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* atas keberhasilannya melaksanakan program pertanian berbasis desa mewujudkan awal The New Bantaeng yang diluncurkan sejak 2008, namun mengalami berbagai hambatan terutama pola pikir petani yang konvensional.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah membangun *technopark* suatu Kawasan terpadu yang menjadikan Kabupaten Bantaeng menjadi daerah benih berbasis inovasi teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mendukung ketahanan pangan nasional. Perubahan Kabupaten Bantaeng dari daerah tertinggal menjadi daerah maju dan bersih merupakan prestasi pemerintah daerah. Berbagai penghargaan sejak 2009 sampai 2017 sehingga daerah ini disebut The New Bantaeng dengan merangkum berbagai inovasi khususnya sebagai terobosan baru di bidang pertanian.

World Bank (2008) disebutkan sektor pertanian merupakan instrument fundamental untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Menurut

Ibrahim (2013) Indonesia sebagai negara agraris, pertanian merupakan esensi untuk terus meningkatkan pertumbuhannya, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan dan Pengembangan Pertanian (2005) ada beberapa factor yang menyebabkan produksi pangan mengalami kesulitan diantaranya adalah penciptaan lahan subur, dan menurunnya tingkat kesuburan tanah, menurunnya kualitas air dan prasarana air, serangan hama penyakit, tingginya tingkat kehilangan hasil pascapanen dan frekuensi anomali yang semakin meningkat. Langkah awal yang dilakukan oleh pimpinan daerah di sektor pembangunan pertanian adalah menyediakan air melalui proyek Cek Dam sebagai penahan air yang terkendali sesuai kebutuhan petani. Inovasi program Cek Dam bukan hanya memenuhi kebutuhan para petani tetapi mampu mengatasi banjir di ibukota kabupaten.

Kabupaten Bantaeng adalah daerah pertanian tetapi belum bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengentaskan angka kemiskinan. Tahun 2008, Bupati Bantaeng menghadapi masalah infrastruktur jalan, hama, aliran air. Permasalahan sumber daya lahan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng, khususnya Kecamatan Uluere adalah terjadinya alih fungsi hutan hijau 1.505 ha menjadi lahan pertanian potensial hortikultura unggulan berupa tanaman bawang merah dengan nilai produksi Tahun 2019 sebesar 12.905 ton, tanaman kentang dengan nilai produksi 17.552,5 ton tetapi mengabaikan aspek lingkungan hijau resapan air yang berdampak jangka Panjang yakni berpotensi longsor dan banjir sampai di Ibukota Bantaeng.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dalam kaitannya dengan kapabilitas inovasi daerah di sector pertanian, antara lain: (a) jumlah penduduk semakin bertambah menjadi 187.626 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 2018-2019 mencapai 0,54%, jumlah angkatan kerja 98.113 jiwa pada umumnya bekerja disektor hortikultura, perkebunan, peternakan. (b) Garis Kemiskinan Rp 309.357, sehingga persentase penduduk miskin 9,03%. c. pendapatan petani belum maksimal (b) petani lebih menyukai tanaman jangka pendek, (d) petani terbiasa dengan pola tanam konvensional, (e) anggaran pembangunan sector pertanian terbatas (f) ketersediaan pupuk terbatas. Berdasarkan latar belakang, maka untuk Tahun I, penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapabilitas inovasi sector pertanian dalam

meningkatkan pendapatan petani di Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung penerapan inovasi sektor pertanian di Kabupaten Bantaeng.

Penelitian tentang kapabilitas inovasi sektor pertanian ini sangat urgen dilakukan untuk monitoring manfaat dan dampak terhadap kesejahteraan petani dan pendapatan asli daerah.

BAB II

RESNTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI

A. Renstra dan Peta Jalan Penelitian

Didalam renstra penelitian perguruan tinggi sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Publik di fokuskan pada kajian Good Governance. Penelitian yang telah berkontribusi menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain: (1) Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait kinerja pelayanan perizinan di Kota Makassar menunjukkan bahwa kinerja pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Makassar belum memuaskan kepada masyarakat yang berkepentingan. (2) Sedangkan penelitian tentang hubungan e-government terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Bantaeng khususnya di bidang pelayanan juga masih rendah. (3) Demikian pula penelitian Tahun I 2017 terkait Inovasi Pelayanan Izin Usaha menunjukkan bahwa inovasi telah diterapkan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan mampu meningkatkan kinerja pelayanan. Sedangkan penelitian Tahun II 2018 terkait kinerja inovasi pelayanan izin usaha menunjukkan bahwa inovasi pelayanan yang diterapkan selama mampu meningkatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, inovasi pelayanan izin usaha mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, serta terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan penelitian tentang Kapasitas Inovasi pemerintah di sector pertanian yang akan mengungkap kontribusi terhadap tingkat pendapatan petani, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, serta ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng pada khususnya dan kemandirian pangan di Sulawesi Selatan pada umumnya.

Pada akhir penelitian ini akan di kemukakan implikasi teoritis untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pelayanan public. Sedangkan implikasi metodologis akan merekomendasikan penelitian berikutnya untuk menggunakan metode yang tepat untuk menganalisis pengembangan inovasi pemerintah daerah. Demikian pula implikasi praktis akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah (lokus penelitian) model inovasi yang sesuai dengan karakteristik daerah di Sulawesi Selatan.

B. Luaran Penelitian Berdasarkan Renstra

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun I (2020) menghasilkan Jurnal Internasional bereputasi dan Buku ajar ISBM serta seminar internasional. Sedangkan luaran hasil penelitian Tahun II (2021) adalah Jurnal Internasional Bereputasi, prosiding bereputasi dan Buku Hasil penelitian.

C. Urgensi Penelitian

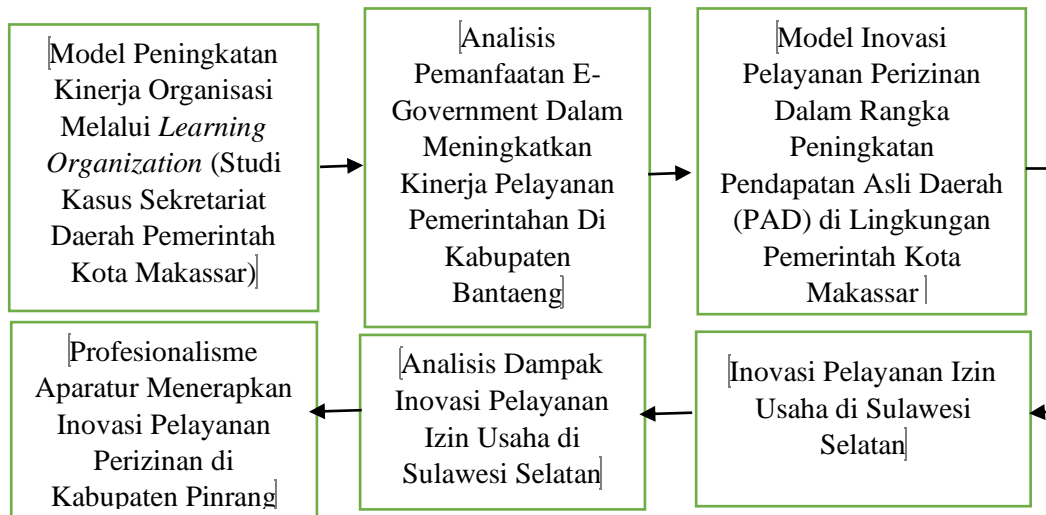
Meskipun penelitian tentang inovasi pemerintah daerah, sudah pernah ada meneliti namun ruang lingkup kajiannya lebih focus pada pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan secara umum. Sementara penelitian ini lebih focus pada penelitian kapasitas inovasi pemerintah daerah disektor pertanian karena lokus penelitian bertumpu pada pengembangan hasil-hasil pertanian yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Secara akademik, urgensi penelitian ini yaitu peneliti menyadari bahwa jika ada perbaikan kinerja pemerintah di sector pertanian melalui inovasi maka akan berpengaruh pada peningkatan meningkatnya iklim investasi atau usaha baru yang berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan petani, serta Kabupaten Bantaeng menjadi daerah maju dan modern sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan hasil-hasil pertanian bisa bersaing dengan produk pertanian di luar negaeri.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peta Jalan Penelitian

Didalam renstra penelitian perguruan tinggi sesuai dengan bidang Ilmu Administrasi Publik di fokuskan pada kajian Good Governance. Penelitian yang telah berkontribusi menganalisis penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) antara lain:



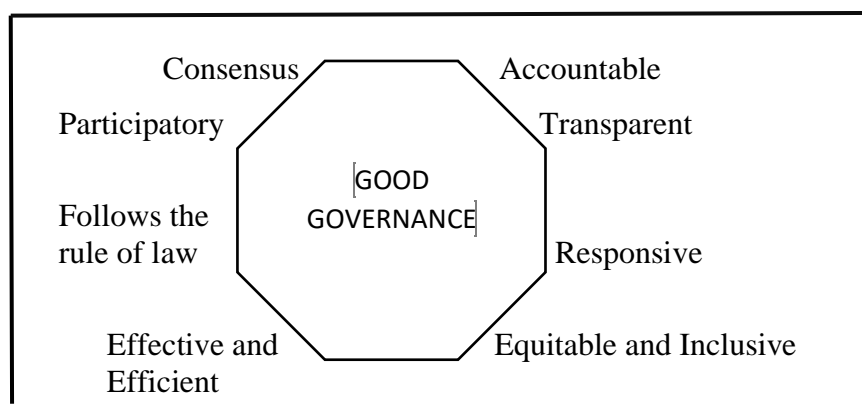
Berdasarkan peta jalan penelitian tersebut di atas perlu dilakukan penelitian tentang Kapabilitas Inovasi pemerintah di sector pertanian yang akan mengungkap kontribusi terhadap tingkat pendapatan petani, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi keberlanjutan inovasi sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Bantaeng.

2. Governace dan Good Governance

Menurut Hadiwinata (2007) Pemerintahan adalah kegiatan-kegiatan lembaga atau badan public dalam menjalankan fungsi untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan Rondinelli (2007) pemerintahan merupakan proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas-tugas, pola, fakta dan fungsi dari pemerintah. Selanjutnya Bhatta (1996) mengungkapkan unsur utama *governance* sebagai badan yang menyelenggarakan memerintahan negara memiliki unsur utama yaitu: *accountability, transparency, openness, rule of law, management competence, and human right*.

Assumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara sector pemerintah sebagai penyedia perangkat aturan dan kebijakan, sector swasta sebagai penggerak roda perekonomian, dan sector civil society melakukan aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi (Kooiman, Jan, 1999). Good governance sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik karena melibatkan seluruh komponen bangsa yang meliputi aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya (Suhady, 2005).

Asian Development Bank menegaskan adanya consensus umum bahwa good governance dilandasi oleh empat pilar yaitu : (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) participation. United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) menetapkan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan good governance yaitu:



Sumber: UNESCAP, 2010

3. Konsep Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk berubah dan mengembangkan prasyarat penting dan cepat untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kompleksitas kapabilitas mencerminkan adanya kebutuhan internal untuk menguasai tugas-tugas yang kompleks. Menurut Lawson dan Samson (2001) kapabilitas inovasi merupakan kemampuan untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan ke dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan system yang baru bagi keuntungan Lembaga dan stakeholder. Kim (1997) mengemukakan kapabilitas

inovasi sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menggunakan pengetahuan yang berbasis pada pengetahuan lama. Sedangkan Burgelman et al (2004) kapabilitas inovasi sebagai serangkaian karakteristik komprehensif dari suatu organisasi yang memfasilitasi dan mendukung strategi inovasi (Atoche, 2007). Inovasi merupakan salah satu kunci sukses organisasi, akan tetapi kapabilitas sumber daya manusia yang mempunyai keahlian merupakan faktor yang penting untuk inovasi (Baldwin, 1999). Kapabilitas organisasi merupakan kombinasi dari keahlian, kompetensi sumber daya manusia dan kapasitas organisasi untuk menerapkan keahlian yang dimiliki sehingga kapabilitas organisasi terkait pula dengan system dan proses (Meiwanda, 2016).

Shapiro (2002) melihat inovasi sebagai sebuah keunggulan kompetitif dari suatu organisasi. Shapiro mengembangkan konsep untuk melihat kemampuan suatu organisasi dalam berinovasi dengan melihat lima elemen kapabilitas inovasi, yaitu : (1) strategi (*strategy*), (2) pengukuran (*measurement*), (3) proses (*processes*), (4) sumberdaya manusia (*people*), dan (5) teknologi (*technology*). Kapabilitas inovasi menurut Shapiro memungkinkan sebuah organisasi melakukan semua aktivitasnya dengan kinerja yang optimal, yang secara tipikal menghendaki adanya proses, sumberdaya manusia, dan teknologi. Kapabilitas inovasi berasal dari strategi yang secara nyata dilakukan oleh suatu organisasi dan mampu mengantarkan output yang dapat diukur.

Menurut hasil penelitian Lustiadi (2016), Kholilulloh (2013) bahwa kapabilitas pimpinan puncak suatu Lembaga memiliki *strategic thinking* sehingga kebijakan strategis yang diambil akan diterima oleh semua kalangan. Sejalan dengan Graham Beaver & Christopher Prince (2002), sifat, komposisi, dan kualitas pimpinan merupakan pusat inovasi dan kinerja dari setiap organisasi. Peran pimpinan sangat menentukan pencapaian visi dan misi, tujuan organisasi (Tricahyadinata, 2013).

4. Konsep Inovasi Dalam Administrasi Publik

United Nations, (2007), sebuah inovasi dapat mencakup penggabungan elemen baru dan meninggalkan cara kerja tradisional dalam melakukan sesuatu aktivitas. Rogers, (2003), Sangkala (2013) Inovasi dapat mengacu kepada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan proses baru. Dalam perpektif *New Public Management* yang ditujukan oleh Osborne dan Gaebler (1992), melalui gagasan

konseptualnya yang sangat populer yaitu *Reiventing Government* untuk mendukung tumbuhnya model pemerintahan baru yang disebut dengan *entrepreneurial government*, menjadikan peran birokrasi menjadi pelayan kebutuhan public. Demikian pula Ehsan dalam Irwan Noor (2013) mengemukakan bahwa doktrin New Public Management (NPM) bagi negara maju dan negara berkembang merupakan respons yang tepat agar administrasi sektor public lebih efisien, efektif dan responsive. Doktrin tersebut memunculkan inovasi pada kajian administrasi publik sesuai pandangan Farazman (2004) *without managerial system, innovative policies are doomed to failure*. Tang Abdullah (2016) pada umumnya inovasi dalam pemerintahan lahir dari ide kreatif jika dilaksanakan dengan sukses akan membantu pemecahan masalah public yang bersifat mendesak.

United Nations melalui Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA, 2005) inovasi dalam kajian administrasi public dapat dibedakan tipe, sebagai berikut: (1) Institutional innovation; (2) Organizational innovation; (3) Process innovation; (4) Conceptual innovation; Selanjutnya Halvorsen (2005) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor public, meliputi: a. Incremental innovation to radical innovation; b. Top Down Innovation to bottom up innovation; c. Need led Innovation and efficiency – led innovation; Menurut Albury, D. (2005), Robbins (2007), Halvorsen (2005) Ciri inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas, maupun kualitas.

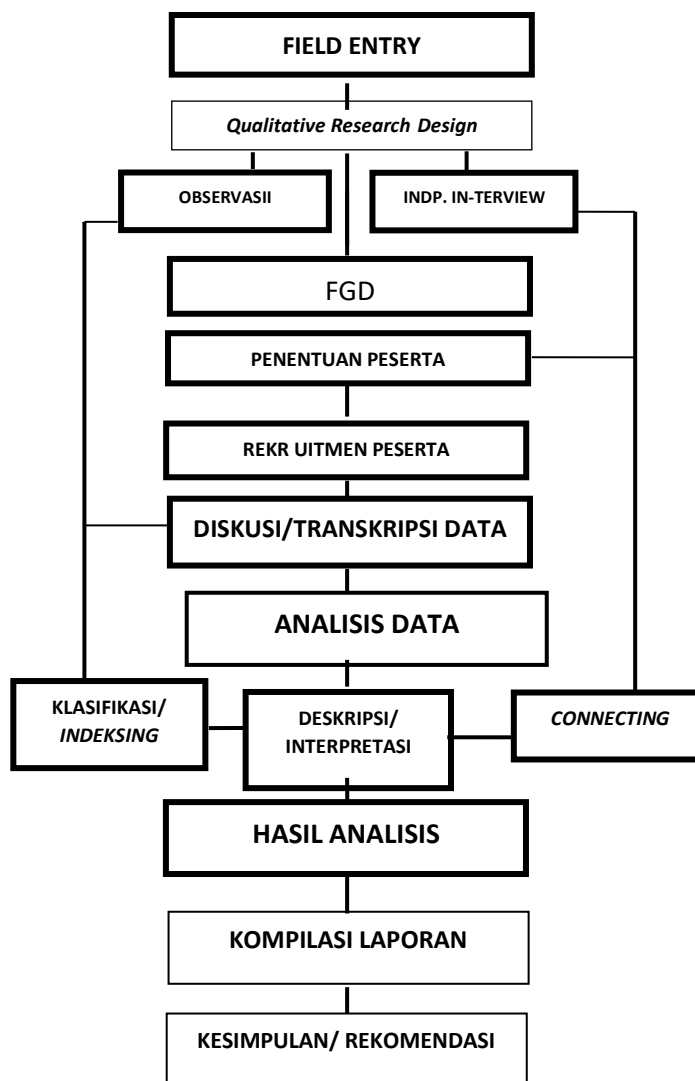
Dubay Municipality, (2003) praktek inovasi telah terbukti dan sukses berdasarkan indicator: (1) memiliki dampak untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; (2) hasil kerjasama yang efektif antara sektor public, sektor swasta, dan masyarakat madani; (3) berkelanjutan secara social, budaya, ekonomi, dan lingkungan. United Nation (2007) best practices inovasi sektor public; meningkatkan kepedulian para pengambil kebijakan dan masyarakat umum terhadap solusi potensial dari masalah social, ekonomi dan lingkungan. Adapun kriteria innovative governance sebagai best practices menurut United Nation dalam Sangkala (2013), meliputi: (1) Impact; (2) Partnership; (3) Sustainability; (4) Leadership and Community Empowerment; (5) Gender Equality and Social Inclusion; (6) Innovation Within Local Content and transferability.

BAB IV

METODE PENELITIAN

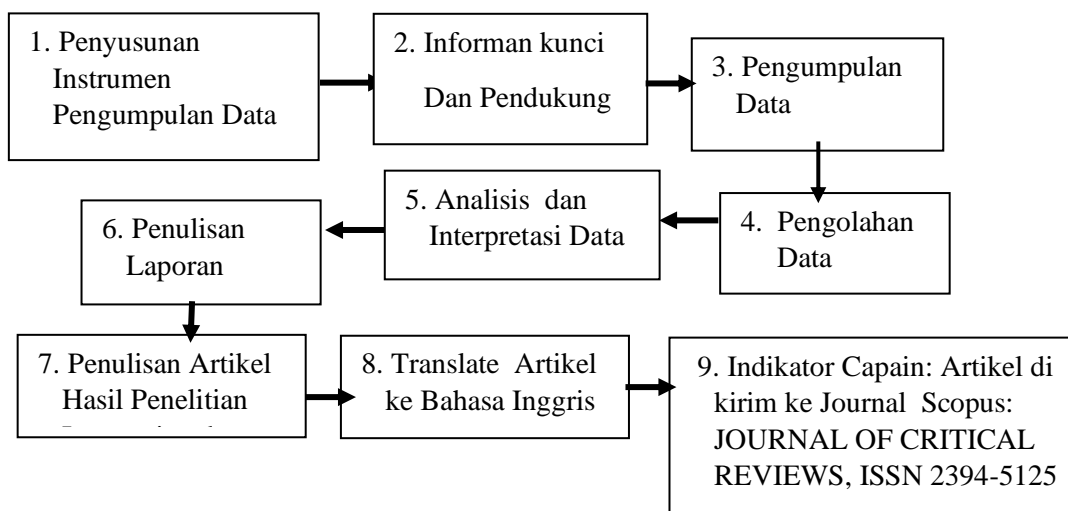
1. Desain dan Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Huberman, 2014). Tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis kapabilitas inovasi sektor pertanian sebagai upaya percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng. Untuk lebih jelasnya desain penelitian dapat dilihat pada bagan berikut:



2. Tahapan Penelitian dan Indikator Capaian

Penelitian tentang Analisis Kapabilitas Inovasi Pemerintah Daerah pada Sektor Pertanian di Kabupaten Bantaeng akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:



3. Pembagian Tugas Tim Peneliti

Adapun tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan, seperti tabel berikut ini:

Nama Tim Peneliti	Kedudukan	Uraian Tugas
Dr, Drs. Badu, M.Si.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Proposal Penelitian berdasarkan hasil survey dan hasil penelitian terdahulu. 2. Menyusun Instrumen Pengumpulan Data 3. Kelengkapan (lokasi penelitian) mengumpulkan data sekunder dan data primer 4. Melakukan pengolahan data sekunder dan data primer dilanjutkan dengan penulisan laporan 5. Menulis draft artikel hasil penelitian.
Prof. Dr. Drs. Rakhmat, M.S.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi masukan terkait substansi penelitian 2. Menyediakan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Analisis data dan penulisan laporan akhir hasil penelitian. 4. Memeriksa kembali Artikel sebelum dikirim ke journal internasional yang dituju.
Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi subsntasi Proposal Penelitian. 2. Menyusun Instrumen Pengumpulan Data primer (format wawancara) 3. Kelengkapan (lokasi penelitian) mengumpulkan data sekunder dan data primer 4. Melakukan pengolahan data primer dilanjutkan dengan penulisan laporan 5. Melengkapi draft artikel hasil penelitian. 6. Translate Artikel ke Bahasa Inggris. 7. Mengirim Artikel ke Journal Scopus: JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, ISSN 2394-5125

4. Lokasi Penelitian

Lokus yang dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Kecamatan, dan Desa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alasan pemilihan lokus penelitian karena menjadi sasaran inovasi pertanian yang bertujuan meningkatkan pendapatan petani dan pendapatan asli daerah.

5. Penentuan Informan

Penetapan informan dalam penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* dilapangan dengan kriteria informan telah diyakini memiliki data yang cukup baik dan valid. Informan kunci (*key informan*) adalah Kepala Dinas Pertanian dan unsur pimpinan terkait, Kepala Badan Ketahanan Pangan, para camat, para kepala desa, ketua kelompok tani, dan tokoh masyarakat.

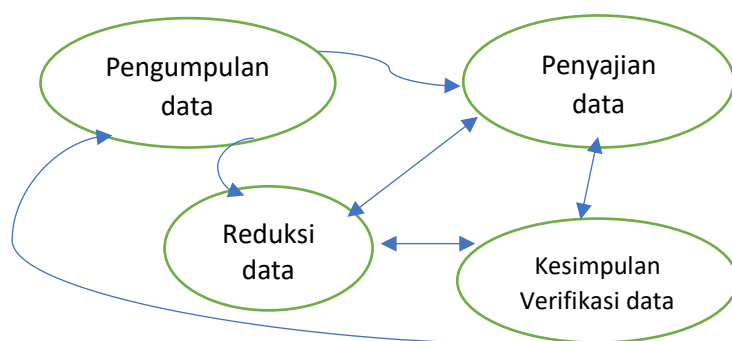
6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi; peneliti mengamati kapabilitas inovasi pemerintah di sektor pertanian sehingga mempermudah mendeskripsikan serta menganalisis sebagai jawaban tujuan penelitian.
2. *Indepth interview* dan *Focus Group Discussion (FGD)*; Teknik ini dilakukan untuk mendapat informasi secara komprehensif dan lengkap dalam mendukung pernyataan hasil penelitian.
3. Dokumentasi; Bahan informasi yang diperlukan melalui dokumen berupa Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan dan Keputusan bupati/walikota terkait RPJMD, Renstra, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lain yang mendukung analisis dan penyajian tujuan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman (2014) mencakup tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. Adapun model interaktif dalam menganalisis data penelitian sebagai berikut:



Sumber: Miles dan Huberman, 2014

8. Luaran Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengungkap dan memuat kondisi factual tentang kapasitas inovasi sektor pertanian yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng yang akan diseminarkan secara Internasional dan dipublikasikan pada jurnal internasional

bereputasi, prosiding bereputasi, book chapter ber-ISBN., dan draft Buku Nasional ISBN.

9. Indikator Capaian

Out come : penggunaan hasil penelitian ini sebagai salah satu sumber informasi dalam perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng terutama inovasi kebijakan pertanian sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Benefit: pengelolaan potensi pertanian mendorong peningkatan perkapita masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantaeng

Impact : hasil penelitian ini mendeskripsikan betapa pentingnya inovasi pemerintah di sektor pertanian sebagai upaya peningkatan pendapatan atau perkapita untuk kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bantaeng.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Umum Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan Data Statistik (2019) Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42" - 120°05'27" Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km².

Wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8 wilayah kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Bissappu (32,84 km² atau 8%), Uluere (67,29 km² atau 17%), Sinoa (43 km² atau 11%), Bantaeng (28,85 km² atau 7%), Eremerasa (45,01 km² atau 11%), Tompobulu (76,99 km² atau 20%), Pa'jukukang (48,9 km² atau 12%), dan Gantarangkeke (52,95 km² atau 14%).

Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto.

Iklim Suhu udara tertinggi di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 sebesar 22,70C terjadi pada bulan Oktober dengan kelembaban udara sebesar 50%, tekanan udara sebesar 882,6 mb, dan penyinaran matahari sebesar 23,0%. Sedangkan, suhu terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus yaitu sebesar 19,80C dengan kelembaban udara sebesar 72% dan 66%, tekanan udara sebesar 883,1 mb dan 882,5 mb, dan penyinaran matahari sebesar 21,0% dan 23,1%. Hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu 26 hari dengan curah hujan 541 mm.

Berdasarkan hasil dari registrasi penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, jumlah penduduk di Kabupaten Bantaeng adalah sebanyak 201.115 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 187.626 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami pertumbuhan sebesar 0,54 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng

berdasarkan data hasil registrasi penduduk tahun 2019 mencapai 508 jiwa/km², yang berarti bahwa dalam satu km² di huni oleh 508 penduduk. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.405 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 171 jiwa/km². Angka rasio jenis kelamin tahun 2019 berdasarkan data registrasi penduduk adalah 97,70, sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk, angka rasio jenis kelamin adalah 92,94. Berdasarkan data hasil proyeksi penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Bantaeng tahun 2019 mencapai 474 jiwa/km², yang berarti bahwa dalam satu km² di huni oleh 474 penduduk. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam, dan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bantaeng dengan kepadatan sebesar 1.351 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Uluere sebesar 171 jiwa/km². Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng tertinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebanyak 17.600 jiwa dan terendah berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 3.066 jiwa.

Perkembangan Penduduk Lima Tahun Terakhir dapat disajikan pada table, dibawah ini:

Tahun	Keadaan Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2015	183.386	0,61
2016	184.517	0.61
2017	185.581	0,57
2018	186.612	0,55
2019	187.626	0,54

Sumber : BPS Bantaeng, 2020

Ketenagakerjaan Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional bulan Agustus tahun 2019, penduduk usia kerja Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 sebanyak 136.680 jiwa dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 71,78 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia kerja terdapat 71 sampai 72 penduduk yang merupakan angkatan kerja. Sementara itu, jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebanyak 3.903 jiwa, sehingga tingkat pengangguran mencapai 3,98 persen. Penduduk usia kerja yang termasuk dalam

pangganguran terbuka paling banyak berpendidikan terakhir Tidak/ Belum Pernah Sekolah dan Tidak/ Belum/Tamat Sekolah Dasar yaitu sebanyak 1.566 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 1.424 jiwa. Sementara itu, berdasarkan status pekerjaan utamanya, penduduk yang bekerja paling banyak merupakan Buruh tani/Karyawan/Pegawai yaitu sebesar 24.425 jiwa, dan diikuti dengan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar yaitu sebesar 22.280 jiwa.

5.2 Deskripsi Sektor Pertanian Berdasarkan Potensi dan Komoditas Unggulan

Lahan sawah seluas 7.829 Ha dengan hasil produksi rata-rata 6.500 kg per Ha. Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi Bangunan, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tegal/Kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah. Ladang/Huma adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun.

Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (hasil per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen

dilakukan setiap bulan dengan pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran $2\frac{1}{2}$ m x $2\frac{1}{2}$ m. Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada saat petani melakukan panen. Data produksi padi dan palawija yang disajikan adalah dalam kualitas: gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), biji kering (kedelai dan kacang tanah), dan umbi basah (ubi kayu dan ubi jalar).

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim. Tanaman sayuran semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, dan umbinya, yang berumur kurang dari satu tahun. Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.

Tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun. Luas panen tanaman hortikultura adalah luas tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias yang diambil hasilnya/dipanen pada periode pelaporan. 10. Luas panen untuk tanaman sayuran adalah luas tanaman yang dipanen sekaligus/habis/ dibongkar dan luas tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/belum habis. Tanaman yang dipanen sekaligus/ habis/dibongkar adalah tanaman yang sehabis panen langsung dibongkar/dicabut, terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kol/ kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, dan kacang merah.

Tanaman yang dipanen berkali-kali (lebih dari satu kali)/ belum habis adalah tanaman yang dipanen lebih dari satu kali dan biasanya dibongkar apabila saat panen terakhir sudah tidak memadai lagi, terdiri dari: kacang panjang, cabe besar, cabe

rawit, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam, melon, semangka, dan blewah. 11. Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/ tanaman yang menghasilkan pada bulan/triwulan laporan.

5.2.1 Holtikultura

Hortikultura Hasil tanaman semusim yang cukup dominan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2019 adalah kentang, wortel, dan bawang merah, masing-masing berproduksi sebesar 17.901,5 ton; 14.896,9 ton; dan 13.362,5 ton. Sedangkan, untuk tanaman tahunan hasil yang cukup dominan adalah mangga, pisang, dan rambutan, masing-masing produksi komoditas tersebut sebesar 2.947,3 ton; 1.909,4 ton; dan 1.018,1 ton. Berikut akan disajikan luas (ha) panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang cukup dominan Tahun 2019, sebagai berikut:

Jenis Tanaman	Luas (ha)	Produksi (Ton)
Bawang Merah	1712	13.362,5
Kentang	951	17.901,5
Wortel	767	14.896,9
Kubis	516	9.996,5
Cabai Besar	148	2036,8
Cabai Rawit	120	968,2
Bawang Daun	78	844,0
Sawi	75	1173,5
Tomat	79	1804,4
Buncis	35	195,7
Terung	44	1390,5
Ketimun	49	1710,3

Sumber: Olahan Data BPS Bantaeng, 2020

5.2.2 Peternakan

Peternakan Populasi ternak pada tahun 2019 paling banyak adalah kambing sebanyak 28.834 ekor, kuda sebanyak 17.157 ekor, dan sapi potong sebanyak 16.654

ekor. Produksi daging 26 unggas didominasi oleh ayam pedaging dan ayam petelur, yaitu sebanyak 970.647,76 kg dan 185.108,16 kg.

Berikut ini akan disajikan populasi ternak dan produksi daging ternak dan unggas berdasarkan jenis ternak dan unggas di Kabupaten Bantaeng Tahun 2019, sebagai berikut:

Jenis Ternak	Populasi (ekor)	Produksi Daging (kg)
Sapi Potong	1101	184.590
Kerbau	13	2.400
Kuda	864	142.560
Kambing	5914	88.277
Ayam Kampung	883.609	95.252,08
Ayam Petelur	252.671	185.108,16
Ayam Pedaging	1.032.604	970.647,76
Itik	13.257	8311,8
Itik Manila	11.579	7641,7

Sumber : Olahan data LKJ dan BPS, Bantaeng, 2019.

5.2.3 Perkebunan

Perkebunan Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2019 didominasi oleh komoditas kakao yaitu sebanyak 2.880 ton, kapuk sebanyak 1.415,5 ton, dan kopi robusta sebanyak 1.336,4 ton. Data rinci mengenai produksi dan luas panen berbagai komoditas tanaman perkebunan seperti table di bawah ini:

Jenis Tanaman	Luas (ha)	Produksi (Ton)
Kakao	5.392,30	2.880
Kopi Rebusta	2.880,50	1.336,40
Kapuk	1.868	1.415,50
Kelapa Dalam dan hibrida	985,50	812,35
Kopi Arabika	955	408,32
Jambu Mete	855	441,50
Kemiri	773,0	526,80
Cengkeh	753,50	370,10
Tembakau	115	118,50
Lada	85	6,30
Kapas	39	7,60
Aren	13,65	1,04

Sumber: Olahan Data BPS Bantaeng, 2020

Kontribusi pendapatan Dinas Pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng, selama tiga tahun, seperti table berikut:

Tahun	Sumber Penerimaan	Jumlah (Rp)
2018	RPH (Rumah Potong Hewan, UPT Balai Benih Ketahanan Pangan, UPT Balai Benih Holtikultura, Perkebunan	972.625.400
2019	RPH, UPT Balai Benih Ketahanan Pangan, UPT Balai Benih Holtikultura, Perkebunan	368.567.600
Sampai Mei,2020	RPH, UPT Balai Benih Ketahanan Pangan, UPT Balai Benih Holtikultura, Perkebunan	321.791.000
	Jumlah	1.662.984.000

Sumber: Dinas Pertanian, 2020

Tingkat kesejahteraan masyarakat Banrtaeng berdasarkan rata-rata pengeluaran/kapita diperoleh dari data stastitik yang dapat diakses <http://bantaengkab.bps.go.id> diperoleh gambaran seperti dalam table di bawah ini:

Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Kelompok Masyarakat	2018		2019	
	Makanan	Non Makanan	Makanan	Non Makanan
20% ke atas	Rp 813.052	Rp 1.011.678	Rp 783.069	Rp 1.072.867
40% Menengah	Rp 480.727	Rp 833.366	Rp 516.658	Rp 394.807
40% ke bawah	Rp 248.987	Rp 174.255	Rp 262.020	Rp 168.721

Sumber: BPS Dinas Pertanian, 2020.

Penjelasan: Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam table dia di atas

diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Inovasi Percepatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil penelitian lapangan bahwa inovasi sektor pertanian yang diimplementasikan sebagai program percepatan pembangunan pertanian, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian merupakan langkah strategis dalam mewujudkan program unggulan pembangunan pertanian sebagai solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bantaeng. Program unggulan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng meliputi: (a) program peningkatan kesuburan tanah, (b) program keseimbangan pembukaan lahan baru tanaman hortikultura dengan pelestarian hutan lindung, (c) program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, (d) program distribusi pemasaran pasca panen, (e) program peningkatan dinamika dan kapasitas penyuluh dan kelompok tani, (f) program peningkatan ketahanan pangan, (g) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, (h) Program Peningkatan Produksi Peternakan.

Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, telah menciptakan dan mengimplemetasikan inovasi untuk mendukung ke delapan program di atas, dapat dilihat di table di bawah:

Jenis Inovasi	Deskripsi Keberhasilan
Kabupaten Penghasil Benih Berbasis Teknologi,	Keberhasila inovasi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan benih tanaman kentang (G1, G2, G3) unggul bersertifikat - Pengembangan umbi satoimo - Pengembangan bibit bawang merah bersertifikat varietas lokana - Ketersediaan benih padi inbrida varietas membarno Syafaat Tani unggul bersertifikat - Pengembangan benih jagung hibrida - Pengembangan bunga krisen - Pengembangan anggrek - Pengembangan bibit rumput laut - Pengembangan benih ikan nila salina - Meningkatkan produksi - Kelompok tani mandiri benih - Swasembada benih.
Gerakan Sistem Tanam Legowo-21	Keberhasilan Inovasi: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan hasil produksi padi

	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan dalam aplikasi pupuk - Terjamin Ketersediaan dan kecukupan benih padi syafaat tani unggul
Pengembangan Kawasan Agrowisata di Uluere	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengembangan wisata pertanian dalam bentuk wisata alam mini show farm, para pengunjung dapat menikmati secara langsung berbagai buah-buahan misalnya apel, stroberi - Program pemberdayaan masyarakat dengan sistem home stay. Kedua program tersebut sampai saat ini kurang berkembang disebabkan: masyarakat kurang tertarik terlibat karena pendapatan rendah, pengunjung kurang tertarik karena akses jalan yang cukup jauh dan rumah makan kurang mendukung.
Membentuk BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> - Badan yang mengelola potensi desa untuk kesejahteraan warga desa - Telah meningkatkan perekonomian masyarakat Bantaeng hingga tingkat desa-desa. - Memudahkan masyarakat mengakses modal usaha kecil dan menengah, kebutuhan petani lainnya.
Mengembangkan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	<p>Keberhasilan Inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kelompok usaha sesuai dengan bakat masyarakat. - Pembentukan dan penguatan Industri Kecil Menengah, khususnya usaha rumah tangga - Pemberdayaan masyarakat wanita tani melalui bantuan modal dalam mengolah hasil pertanian misalnya makanan non beras, kue-kue basah dan kering, keripik pisang, keripik talas, keripik singkong
Pengembangan Teknik Inseminasi Sapi	<p>Keberhasilan Inovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan mutu genetic sapi - Peningkatan populasi sapi - Peningkatan pendapatan peternak - Pemberdayaan peternak dalam pemeliharaan ternak sapi, kuda dan kambing - Peningkatan produksi dan produktivitas ternak sapi, kuda dan kambing.
Memanfaatkan Limbah Ternak Jadi Biogas di Pedesaan,	<ul style="list-style-type: none"> - Desa-desa yang banyak ternaknya memanfaatkan limbah menjadi energi alternative. Pemanfaatan menjadi biogas ini secara tidak langsung membantu mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap gas. - Selain dijadikan sebagai energi alternative, limbah ternak juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik padat dan cair.
Memanfaatkan Limbah Pangan Jadi Pakan	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan limbah pangan dari perkebunan kopi, coklat, biji kapuk menjadi pakan ternak - Meningkatkan hasil produksi ternak dengan biaya pakan yang murah.
Penangkaran Talas Bantaeng,	<ul style="list-style-type: none"> - Kampung Bokara sebagai pusat penangkaran talas. - Penangkaran dilengkapi dengan laboratorium kultur jaringan sehingga dapat mempercepat kebutuhan bibit tanaman berbasis ekspor - Pemerintah memberi perhatian khusus karena permintaan dari luar negeri khususnya Jepang yang semakin tinggi.
Budidaya Durian Tanpa Aroma dan Tanpa Musim,	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap saat buah durian di Bantaeng bisa dinikmati - Memiliki kadar kolestrol yang rendah - Hasil rekayasa yang dikembangkan dengan teknologi pemupukan sehingga hasilnya lebih baik dari aslinya - Perkebunan durian terletak di Desa Kacidu Kecamatan Tompobulu dengan luas dua hektar area.
Asuransi Usaha Ternak Sapi	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ternak sapi yang terasuransikan sebanyak 3000 ekor atau (100%) sesuai target. - Memberikan perlindungan kepada peternak yang mengalami kerugian akibat ternaknya mengalami resiko mati karena sakit, mati karena melahirkan, mati karena keracunan atau kecelakaan, serta hilang karena kecurian. - Memberikan bantuan pembayaran premi kepada peternak sebesar Rp 40.000/ternak/tahun.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ternak teridentifikasi dengan baik - Ketersediaan kartu ternak tepat waktu - Ketersediaan Sumber daya petugas pendampingan pemeliharaan ternak
Asuransi Usaha Tanam Padi	<ul style="list-style-type: none"> - lahan sawah yang terasuransikan seluas 2.036 ha (67,89 %) dari target 3.000 ha. - Memberikan perlindungan kepada petani ketika mengalami gagal panen akibat kekeringan, banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman - Memberikan bantuan pembayaran premi kepada petani sebesar Rp 36.000/hektar/musim tanam. - Tersedianya sumber-sumber air pada lahan sawah yang akan didaftarkan di asuransi - Ketersediaan Sumber daya penyuluh pertanian - Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengimputan online aplikasi system informasi.
Jaminan Ketersediaan Pupuk dan Bibit	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan mencukupi pupuk bersubsidi bagi petani, meskipun didukung pupuk organik - Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Pertanian cukup terbatas. - Ketersediaan bibit dan benih petani dan kelompok tani.

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2020.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah memiliki aplikasi E-Benih www.ebenih.com bertujuan untuk mendongkrat kegiatan Bantaeng Technopark. E-Benih adalah aplikasi yang diharapkan menjadi *e-commerce* milik Unit Pelaksana Tugas Daerah Bantaeng Technopark untuk penjualan bibit, benih dan hasil komoditi. Secara struktur aplikasi e-benih dibangun dengan dua aplikasi pendukung sebagai *payment gateway* (gerbang atau medium transaksi secara online) dan *shipping gateway* (gerbang atau medium pengiriman secara online). *User Guide Manual* yang dibangun mencakup aplikasi utama dan aplikasi pendukung tersebut. Adapun bibit dan benih yang bisa ditemukan di dalam aplikasi tersebut antara lain: umbi satoimo, benih padi syafaat tani, bibit bawang merah loka'na, bibit kentang G1, G2, G3 unggul dan lain-lain.

5.4 Kapabilitas Inovasi Pertanian di Kabupaten Bantaeng

Kapabilitas inovasi pemerintah dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dapat dianalisis berdasarkan pendapat Shapiro (2002) yaitu dimensi: strategi, pengukuran keberhasilan, sumber daya manusia, penggunaan teknologi.

1. Strategi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa strategi pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng focus pada penanganan surplus dan swasembada pada berbagai sektor komoditas pertanian menuju kedaulatan pangan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Sekretaris Dinas Pertanian: “bahwa mulai tahun 2013 sampai sekarang Kabupaten telah surplus dan swasembada pangan, pendapatan dan kesejahteraan semakin meningkat yang bersumber produksi padi sawah, sayur-sayuran, hasil tanaman keras misalnya kopi, kapuk, cengkeh, peternak sapi, kuda, kambing, produksi ayam potong, ayam petelur, maupun ayam kampung. Keberhasilan tersebut dicapai atas dukungan dan kerjasama yang harmonis antara para petani, penyuluh, dan swasta sebagai pelaku usaha hasil-hasil pertanian”. Sejalan penjelasan UN-Dubay Municipality (2003) praktek inovasi secara konsisten berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan inovasi selanjutnya adalah pemerintah berupaya mengatasi tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta degradasi sumber daya alam. Hasil wawancara Kepala Dinas Pertanian, mengemukakan “strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengembangkan klasterisasi lahan sesuai dengan potensi. Strategi ini sejalan yang dikemukakan United Nation (2007) praktek terbaik inovasi adalah meningkatkan kepedulian pengambil kebijakan dan masyarakat dalam mengatasi masalah social, ekonomi dan lingkungan. Setiap lokasi lahan yang akan dialih fungsikan harus melalui persetujuan Bupati Kepala Daerah. Kecamatan yang kurang curah hujan sehingga pertanian kurang berhasil dijadikan sebagai kawasan pengembangan industry. Sampai saat ini dari 3000 hektar area, sudah 1000 yang terjual. Strategi ini menjadikan peningkatan pendapatan masyarakat, tadinya tanah yang tidak bernilai, setelah masuknya industry, justru menikmati hasil yang baik”.

Strategi untuk meningkatkan produksi secara berkesimbangan, pemerintah menjamin ketersediaan air pada lahan pertanian melalui cek dam, waduk, system pompanisasi, sumur bor. Meskipun Kecamatan Uluere sebagai pusat pengembangan holtikultura persediaan air cukup terbatas karena berada pada daerah ketinggian. Hasil produksi talas, kopi, kentang, memiliki daya saing yang berorientasi pasar regional dan internasional. Misalnya umbi talas di ekspor ke Japan dengan jumlah yang cukup besar. Disamping itu, produksi dapat dicapai sesuai target jika kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat memasuki musim tanam teratasi dan terjamin distribusi pupuk dilakukan secara merata ke petani. Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Dinas Pertanian, “bahwa misi yang menjadi prioritas adalah menjamin ketersediaan pupuk an-organik dan pupuk organic, khususnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang akan didistribusikan secara merata kepada petani”. Disamping itu, pemerintah, menerapkan inovasi asuransi gagal

panen padi, dan asuransi ternak sapi. Kerugian akan ditanggung oleh asuransi jika kegagalan panen maupun kematian ternak yang disebabkan karena factor alam seperti serangan hama dan penyakit tidak mampu dikendalikan, bencana alam, dan perubahan iklim.

2. Pengukuran Tingkat Keberhasilan

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah khususnya di sektor pertanian menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Nomor	Internal Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91<	Sangat Tinggi	ST
2	76 <90	Tinggi	T
3	66<75	Sedang	S
4	51<65	Rendah	R
5	<50	Sangat Rendah	SR

Pengukuran kinerja organisasi dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja (performance plan) yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 dengan realisasi (performance result) yang dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dalam rangka memberi kesimpulan pengukuran kinerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi di Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, maka capaian kinerja disajikan melalui Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian dalam tabel, di bawah ini:

Indikator Komoditas	Target	Realisasi	Satuan	%	Kategori
A. Peningkatan Produksi komoditas Pertanian					
Jumlah produksi padi	99,51	84,067.55*	Ton	86,17	Tinggi
Jumlah produksi jagung	179,81	162,698,53*	Ton	90,82	Tinggi

Jumlah produksi kentang	16.839	17.901,50*	Ton	106,31	Sangat Tinggi
Jumlah produksi bawang merah	11.320	13.363*	Ton	118,05	Sangat Tinggi
Jumlah produksi Manga	4.989	2,947.30*	Ton	59,46	Rendah
Jumlah produksi jeruk	455	241*	Ton	55,79	Rendah
Jumlah produksi Cabai rawit	150	968,20*	Ton	657,47	Sangat Tinggi
Jumlah produksi cabai besar	407	2.036,80*	Ton	500,44	Sangat Tinggi
Jumlah produksi kopi Robusta	1.214,80	1,173.5*	Ton	101,43	Sangat Tinggi
Jumlah produksi kopi arabika	520,82	369*	Ton	74,39	Sedang
Jumlah produksi kakao	3242,40	2880*	Ton	88,82	Tinggi
Jumlah produksi cengkeh	212,94	367*	Ton	172,35	Sangat Tinggi
Jumlah produksi sapi potong	31,159	16,663*	Ekor	53,48	Rendah
Jumlah produksi kambing	29,442	28,384*	Ekor	96,41	Sangat Tinggi
Jumlah produksi ayam buras	911,035	2,168,884*	Ekor	238,07	Sangat Tinggi
Kelahiran Ternak Hasil IB	1,000	1,355*	Ekor	135,5	Sangat Tinggi
B. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Peeburuan					
Jumlah kelompok tani	950	167	Kelompok	17,58	Sangat rendah
C. Peningkatan Daya Saing Produk Sektor Pertanian					
Produk olahan hortikultura	3	1	produk	33,33	Sangat rendah
Jumlah produk peternakan	5	5	produk	100	Sangat Tinggi
Luas lahan sawah yang terasuransikan dalam Asuransi Usaha Tani Padi-AUTP	3.000	2.036,6	ha	67,89	Sedang
Jumlah ternak sapi yang terasuransikan dalam Asuransi Ternak Sapi-AUTS	3.000	3.000	ekor	100	Sangat Tinggi
Rata-rata				164,69	Sangat Tinggi

Sumber: Olahan data LKJ Dinas Pertanian, 2019

Maka dari itu, Perbandingan antara capaian kinerja tahun tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Indikator	Satuan	Capaian (%)	
		2018	2019
Jumlah produksi padi	Ton	125,02	86,17
Jumlah produksi jagung	Ton	85,02	90,82
Jumlah produksi kentang	Ton	125,05	106,31
Jumlah produksi bawang merah	Ton	310,99	118,05
Jumlah produksi mangga	Ton	79,12	59,46
Jumlah produksi jeruk	Ton	1015,00	55,79
Jumlah produksi cabai rawit	Ton	200,32	657,47
Jumlah produksi cabai besar	Ton	317,60	500,44

Jumlah produksi kopi rebusta	Ton	100	101,43
Jumlah produksi kopi arabika	Ton	100	74,39
Jumlah produksi kakao	Ton	208,64	88,82
Jumlah produksi cengkeh	Ton	361,43	172,35
Jumlah produksi sapi potong ekor	Ekor	101,99	53,48
Jumlah produksi kambing ekor	Ekor	103,96	96,41
Jumlah produksi ayam buras ekor	Ekor	41,68	238,07
Kelahiran ternak hasil IB ekor	Ekor	--	135,5
Rata-rata		204,74	164,69
Rata-rata Umum		184,72	

Sumber: Dinas Pertanian menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, 2020.

Dari 16 (enam belas) indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran mencapai bahkan melebihi target yang direncanakan, dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran peningkatan produksi komoditas pertanian berhasil mencapai 164,69 persen yang berarti masuk kriteria kinerja sangat tinggi. Realisasi target yang paling tinggi adalah indikator jumlah produksi cabai rawit dengan realisasi sebesar 657,4% (kriteria kinerja sangat tinggi), sedangkan realisasi target yang paling rendah adalah indikator jumlah produksi sapi potong dengan realisasi sebesar 53,48 % (kriteria kinerja rendah). Capaian Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah produksi padi dapat terealisasi 86,17% (kriteria kinerja tinggi) serta jumlah produksi bawang merah dapat terealisasi 118,05% (kriteria kinerja sangat tinggi). Target produksi padi pada tahun ini adalah 99,51 ton dapat direalisasikan hingga 84,067.55 ton dan untuk target produksi jagung pada tahun ini adalah 179,81 ton dapat direalisasikan hingga 162,698,53 ton.

Sementara peningkatan jumlah tenaga kerja di sector jasa pertanian dan perburuhan hanya mencapai 67,89 persen dari 950 kelompok tani yang ditargetkan. Dinas pertanian terus melakukan inovasi yang mendorong daya saing meliputi produk olahan hortikultura, produk peternakan masing-masing terealisasi 33,3% dan 100%. Sedangkan Asuransi Usaha Tani Padi sebagai sarana asuransi usaha tani padi yang berfungsi untuk menanggulangi segala kemungkinan gagal panen terealisasi 67,89% dari 300 hektar area yang ditargetkan, sementara Asuransi Usaha Tani Sapi sebagai sarana asuransi usaha ternak sapi terealisasi 100% dari 3000 ekor sapi.

Capaian sasaran peningkatan produksi komoditas pertanian tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 204,74% pada tahun 2018 turun menjadi 164,69% pada tahun 2019 atau mengalami penurunan sebesar

40,05%. Meskipun demikian, capaian sasaran peningkatan produksi komoditas pertanian masih berada pada trend positif karena mampu terealisasi hingga 164,69% (melebihi 100 %). Pencapaian trend positif ini tidak terlepas dari faktor – faktor sebagai berikut : (1) Motivasi petani dengan adanya jaminan asuransi pertanian terhadap usaha padi dan usaha ternak (Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi) (2) Motivasi petani juga dengan mulai disosialisasikannya Kartu Tani sebagai jaminan kemudahan memperoleh sarana produksi serta alat dan mesin pertanian. (3) Jaminan ketersediaan sarana produksi berupa pupuk dan pestisida dengan adanya pengawasan yang terintegritas (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) terhadap peredaran sarana produksi serta dengan adanya koordinasi yang berkala dan berkelanjutan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi terkait, petani, serta pengecer dan distributor pupuk. (4) Jaminan ketersediaan benih unggul melalui produksi benih Unit Pelaksana Teknis yang di bawah naungan organisasi perangkat daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Daerah Tanaman Pangan, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura dan Tanaman Perkebunan, serta Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak yang akan dimanfaatkan oleh petani. (5) Adanya program brigade alat mesin pertanian dan brigade tanam/panen yang memberikan dukungan dan membantu petani dalam berusaha tani. (6) Penerapan teknologi Jajar Legowo 21 secara optimal. (7) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana produksi serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, baik dari dana alokasi umum maupun dari dana alokasi khusus yang lebih fokus pada pembangunan sumber-sumber air untuk menjamin ketersediaan air pada lahan pertanian.

Hasil wawancara Kepada Dinas Pertanian mengemukakan “Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian meliputi : (a) Pembangunan sumur bor tanah dangkal sebanyak 3 paket, (b) Pembangunan sumur bor tanah dalam sebanyak 7 paket, (c) Pembangunan embung sebanyak 4 paket, (d) Rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 20 paket, (e) Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 6 paket, (f) Pembangunan irigasi sebanyak 4 paket, (g) Pengembangan Irigasi Perpipaan 2 Paket, (h) pengembangan irigasi perpompaan 1 paket. Setelah pembangunan sarana dan prasarana pertanian selesai, maka realisasi capaian kinerja disektor pertanian di masa mendatang akan semakin tinggi akan berdampak pada tingginya pendapatan dan kesejahteraan petani. Keberhasilan yang

dicapai oleh pemerintah daerah, menurut Kim (2007) merupakan indikator kualitas manajemen pemerintah sebagai pusat innovator.

Berdasarkan hasil focus group discussion dihadiri 20 orang dari para penyuluh, ketua kelompok tani dari delapan kecamatan mengemukakan : “bahwa inovasi dan terobosan dalam pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun terakhir merubah pola hidup masyarakat dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan semakin meningkat. Jika dulu petani tanam jagung selanjutnya dijual satu kilogram Rp 2000, sekarang jual benih jagung bisa mencapai Rp 50.000 per kilogram. Produksi benih unggulan mencapai lima ton setiap musim panen. Beberapa komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani antara lain: (a) komoditas yang bersumber dari produksi tanaman pangan meliputi: jagung, padi sawah, dan ubi kayu, (b) komoditas yang bersumber dari produksi tanaman perkebunan meliputi: kapuk, kopi, kelapa, cengkeh, dan kemiri, (c) komoditas yang bersumber dari populasi ternak meliputi: sapi, kuda, dan kambing, (d) komoditas yang bersumber dari produksi daging unggas, meliputi ayam kapung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik, (e) komoditas yang bersumber sayur-sayuran, meliputi: bawang merah, kentang, wortel, dan kubis. Menurut kelompok tani, produktivitas petani juga dipengaruhi oleh penggunaan bibit dan benih unggul bersertifikat, kesediaan pupuk bersubsidi dan pupuk organic. Menurut penyuluh, bahwa produksi terkadang mengalami pluktuasi, hal disebabkan factor iklim, jika musim kemarau produksi hortikultura pasti menurun karena pada umumnya lahannya berada pada wilayah ketinggian”.

3. Sumber Daya Manusia (*people*)

Sumber daya manusia Dinas Pertanian menjadi tulang punggung keberhasilan pencapaian pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng. Dukungan pegawai akan menjadi penggerak roda pelaksanaan kegiatan dinas pertanian. Rasa nasionalisme, koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas sangat penting dalam menjaga keharmonisan organisasi. Selain itu, keimanan, akuntabilitas, komitmen, kejujuran, integritas dan disiplin dapat menjadi penangkal tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sumber daya pegawai Dinas Pertanian berjumlah 143 orang, terbagi atas Jabatan Struktural (esselon)

sebanyak 28 orang, Jabatan Fungsional Umum (staf) sebanyak 51 orang, dan Jabatan Fungsional Penyuluh sebanyak 64 orang.

Berdasarkan hasil wawancara Kepada Bidang Kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng “bahwa untuk mengoptimalkan semua inovasi yang telah diterapkan di Dinas Pertanian, diperlukan peningkatan kapasitas pegawai khususnya tenaga penyuluh agar lebih profesional melakukan pendampingan pada musim tanam dan masa pemeliharaan tanaman serta pasca panen. Hal ini sejalan dengan pandangan Baldwin (1999), kapabilitas sumber daya manusia yang mempunyai keahlian merupakan kunci sukses inovasi organisasi. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat program peningkatan keterampilan bagi penyuluh, petani tanaman hortikultura, petani tanaman padi sawah, usaha peternakan, petani tanaman perkebunan, produksi unggas yang bertujuan untuk meningkatkan produksi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan berdampak pula pada peningkatan pembayaran pajak untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah”.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng diperhadapkan oleh suatu permasalahan pembangunan pertanian berkelanjutan yaitu minat generasi muda, terkhusus sarjana atau alumni diploma di bidang pertanian serta generasi muda tidak tamat sekolah minatnya terhadap dunia pertanian masih rendah sehingga sulit mendapatkan generasi penerus petani di kalangan pemuda sementara para petani banyak yang sudah semakin tua usianya. Pergeseran gaya hidup masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dari hasil pertanian organik yang aman dikonsumsi, bebas pestisida, dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Pertanian “bahwa untuk membangkitkan semangat generasi muda berdasarkan keahlian dan keterampilan, pemerintah membangun akademi komunitas kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, dan Lembaga Pendidikan politeknik Pertanian Gowa. Tantangan berikut yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng adalah kenaikan produksi hasil pertanian dan perkebunan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Bantaeng yaitu Bantaeng pusat benih berbasis teknologi. Benih-benih yang diproduksi akan dipasarkan secara regional dan internasional melalui website: www.ebenih.com. Langkah ini mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

4. Teknologi (*technology*)

Inovasi menjadi kunci dalam reformaasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan public. Sejalan dengan pandangan Ahmad, Badu. (2020) bahwa inovasi teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai inovasi yang dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan system informasi organisasi perangkat daerah berbasis website yang dapat menjadi Bank Data Dinas Pertanian. Adapun nama website dan system elektronik internet yang ada di Dinas Pertanian adalah: distanbantaeng.com dan email: pertanianbantaeng@gmail.com. Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng akan melakukan transformasi Balai Penyuluh Pertanian menjadi Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, dilakukan pelatihan information technology bagi tenaga penyuluh di Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa.

Technopark Bantaeng mewujudkan Kabupaten Benih Berbasis Teknologi. Technopark adalah suatu Kawasan terpadu yang mengembangkan teknologi dan inovasi untuk penelitian, dengan menggabungkan dunia industry, perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang mempercepat aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien. Technopark Bantaeng menjadikan kabupaten benih berbasis teknologi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan penilaian Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bahwa Technopark Bantaeng yang membawa visi dan misi kabupaten benih berbasis teknologi menjadi salah satu Technopark yang sukses di antara Sembilan Technopark lainnya di Indonesia. Untuk pengembangan misi dan tujuan Technopark Bantaeng, daerah ini akan menghasilkan tenaga ahli dibidang perbenihan dan dapat melanjutkan program kabupaten benih yang berbasis teknologi dan inovasi kedepannya.

Disamping itu, pemerintah Kabupaten Bantaeng menjalin kerjasama yang baik dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bandung dalam mengolah varian benih unggul. Hal ini sejalan dengan padangan Kooiman, Jan (1999) bahwa pola kemitraan dan sinergi antara Lembaga merupakan penggerak roda perekonomian, civil society melakukan aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi.

Sentuhan teknologi dan inovasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Bantaeng pada tahun 2019 meningkat pesat dari 8,08 persen menjadi 10,75 persen. Hasil-hasil produk benih olahan Kabupaten Bantaeng hasil kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi antara lain: Mesin *Extruder* pembuat mie dari beras berbahan baku local dan hasil olahan pertanian pangan local lainnya seperti talas, uwi, beras, jagung, cabai, wortel, dan kopi.

5.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Inovasi Pertanian di Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa factor yang mendukung keberhasilan kapabilitas inovasi sebagai terobosan dalam percepatan pembangunan pertanian di Kabupatenn Bantaeng, meliputi:

1. Program pembangunan berbasis desa yang dilengkapi Badan Usaha Milik Desa yang tersebar di delapan kecamatan. Jenis usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi keunggulan produk masing-masing desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk mengakomodir kebutuhan akses permodalan usaha pertanian maupun usaha lain yang mendukung kesejahteraan petani.
2. Pembangunan technopark pertanian bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dengan adanya technopark Bantaeng mampu meningkatkan produktivitas padi, jagung, talas safira, dan buah naga berkualitas ekspor.
3. Pemerintah berhasil mewujudkan visi kabupaten penghasil benih berbasis teknologi. Produksi Benih dan bibit tersebut merupakan unggul bersertifikat dan dapat di pesan dan di akses oleh petani seluruh Indonesia melalui www.ebenih.com.
4. Insfrastruktur jalan desa cukup memadai dalam memperlancar akses para petani, terutama pengangkutan pascapanen.
5. Ketersediaan infrastruktur irigasi di dataran rendah, khususnya petani sawah cukup memadai sehingga masa panen dapat dilakukan dua kali dalam setahun.
6. Terlaksananya gerakan system tanama legowo 21 secara konsisten, sehingga memudahkan petani melakukan pemupukan dan meningkatkan produksi tanaman.
7. Asuransi Usaha Tanam Padi, Lembaga yang memberikan perlindungan kepada petani ketika mengalami gagal panen akibat kekeringan, banjir dan serangan organisme

pengganggu tanaman. Memberikan bantuan pembayaran premi kepada petani sebesar Rp 36.000/hektar/musim tanam.

8. Asuransi Usaha Ternak Sapi, lembaga yang memberikan perlindungan kepada peternak yang mengalami kerugian akibat ternaknya mengalami resiko mati karena sakit, mati karena melahirkan, mati karena keracunan atau kecelakaan, serta hilang karena kecurian. Pihak asuransi memberikan bantuan pembayaran premi kepada peternak sebesar Rp 40.000/ternak/tahun.

Sedangkan factor-faktor yang menghambat tingkat keberhasilan kapabilitas inovasi pemerintah dalam percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng, antara lain:

1. Budaya masyarakat petani belum sepenuhnya mampu menerapkan teknologi pertanian, misalnya sebagian petani sawah lebih memilih bibit sendiri dibandingkan dengan bibit unggul bersertifikat. Menurut Steelman (2010), dimensi budaya yang menghambat keberhasilan suatu inovasi adalah petani sulit “menyesuaikan diri” dengan metode kerja baru.
2. Keengganan menutup program yang gagal. Salah satu inovasi yang kurang berkembang adalah agrowisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh dan ketua kelompok tani dapat disimpulkan “jika inovasi agrowisata tetap dipertahankan, maka pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur pendukung misalnya ketersediaan penginapan yang memadai, rumah makan, dan transportasi”.
3. Ketergantungan berlebihan pada high performers dalam menghasilkan produk tetapi tidak diimbangi oleh ketersediaan dan pemerataan pupuk bersubsidi setiap musim tanam. Disamping itu, capaian kinerja sangat ditentukan oleh kemaampuan dan keterampilan petani dalam mengelola lahan pertanian, komitmen para penyuluh dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam mendampingi petani pada musim tanam, pemeliharaan tanaman, dan pascapanen.
4. Keterbatasan jumlah penyuluh belum seimbang dengan jumlah petani dan kelompok tani sehingga kegiatan penyuluhan belum maksimal.
5. Keterampilan petani dalam mengelola lahan belum maksimal, disebabkan bekerja berdasarkan kebiasaan secara genetic. Pola pikir petani dapat diubah dengan cara

- memberikan pemahaman tentang keberhasilan suatu inovasi mampu meningkatkan produktivitas tanaman.
6. Tidak jelas bentuk penghargaan atau insentif bagi penyuluh dan petani yang meraih keberhasilan. Strategi untuk meningkatkan semangat dan motivasi bagi penyuluh dan petani dalam mewujudkan capaian kinerja adalah memberikan penghargaan kepada penyuluh dan petani baik bentuk finansial maupun non finansial.
 7. Ketidakmampuan menghadapi resiko dan perubahan. Setiap inovasi diperhadapkan resistensi bagi petani karena petani memiliki kebiasaan yang dianggap lebih menguntungkan misalnya inovasi agrowisata kurang berkembang di Kecamatan Uluere karena dukungan masyarakat sebagai obyek pemberdayaan cukup rendah. Hal ini disebabkan tanaman sayur-sayuran lebih menguntungkan dibandingkan mengelola tanaman apel dan stroberi.
 8. Anggaran jangka pendek yang sangat terbatas sehingga beberapa program kerja belum berjalan secara maksimal, misalnya program sosialisasi kepada petani.
 9. Tekanan dan hambatan administrative, misalnya penggunaan anggaran harus sesuai dengan program atau kegiatan, meskipun petani mengalami ancaman gagal panen misalnya serangan hama. Idealnya anggaran jangka pendek tersebut diarahkan untuk mengatasi dan memusnahkan hama yang menyerang tanaman petani.
 10. Modal usaha yang sangat terbatas. Untuk memberi kesempatan para petani mengakses modal usaha tani diperlukan kemitraan dengan Lembaga keuangan, misalnya Badan Usaha Milik Desa, koperasi usaha tani dengan system pinjaman lunak.
 11. Pemasaran produksi tanaman sayur-sayuran yang kurang menentu, sehingga banyak petani mengalami kerugian. Para petani mengharapkan hasil-hasil pertanian terutama sayur-sayuran mendapatkan patokan harga dasar dari pemerintah sehingga para petani mendapat jaminan harga pada saat terjadi transaksi penjualan dengan pengusaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Inovasi daerah hendaknya dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan berorientasi pada tujuan dan manfaatnya. Inovasi penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berkreasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga terbentuk jiwa kompetitif daerah yang semakin positif sehingga daerah makin berkembang. Dengan inovasi juga diharapkan tercipta pelayanan public yang maksimal, peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju konsep “good governance” dengan mainstream penguatan kearifan local dan penguatan kelembagaan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kapabilitas inovasi pemerintah dalam percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bantaeng berhasil meningkatkan produksi di bidang perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Komoditas unggulan yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani pada usaha peternakan adalah meningkatnya populasi sapi, kuda, dan kambing, meningkatnya produksi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Sedangkan pada usaha tanaman perkebunan, meningkatkannya produksi kakao, kopi, kapuk, dan cengkeh. Bidang usaha tanaman hortikultura, meningkatkannya produksi bawang merah, kentang, wortel, dan kubis. Selain itu inovasi kabupaten benih berbasis teknologi berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat menyediakan benih unggul bersertifikat sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat.

Petani lebih menyukai tanaman jangka pendek yang langsung bisa didapatkan nilai ekonomisnya jika di bandingkan dengan menanam apel yang bersifat jangka panjang. Petani masih terbiasa dengan pola tanam yang lama dan sulit merubah ke hal yang baru sebelum ada bukti yang meyakinkannya

Adapun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani akan dilakukan kegiatan: (a) Peningkatan kemampuan lembaga petani, (b) Penanganan asuransi dan pembiayaan untuk pembanguna pertanian, (c) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Tanaman Pangan, (d) Pengembangan

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Hortikultura, (e) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan, (f) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

B. Saran Saran

Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi pada seluruh komoditas untuk tahun selanjutnya meliputi: (a) Mengoptimalkan kinerja sumur bor tanah dalam yang telah dibangun dengan menambah titik-titik resapan air seperti embung untuk menciptakan lebih banyak mata air di dalam tanah, sehingga dapat menghasilkan debit air yang lebih besar. (b) Merehabilitasi jaringan irigasi pertanian yang sudah mengalami kerusakan. (c) Revitalisasi dan pendataan kelompok tani secara berkala dan terstruktur sebagai database penunjang pengambilan kebijakan pertanian. (d) Pembagian Kartu Tani agar petani memperoleh kemudahan dan jaminan ketersediaan sarana produksi secara merata sesuai kebutuhan masing-masing petani berdasarkan luas lahannya, (e) Mendukung dan melaksanakan dengan baik dan berkelanjutan Program Asuransi Pertanian untuk memberikan jaminan usaha apabila petani atau peternak mengalami kegagalan atas usaha tani dan ternaknya akibat faktor alam (bencana alam, perubahan iklim, dan hama/penyakit yang tidak terkendali) atau faktor tertentu yang tidak sengaja, (f) Perumusan dan penetapan peraturan terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk menjaga degradasi lahan akibat alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian, lahan hutang lindung ke lahan hortikultura (g) Penerapan pertanian yang ramah lingkungan melalui metode pupuk organik berimbang untuk mengurangi penggunaan pupuk an-organik/kimia, (h) Melaksanakan pendataan secara berkala terhadap perubahan harga komoditas pertanian sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan terkait harga serta melakukan operasi pasar yang terintegrasi untuk menjaga kestabilan dan pengendalian harga pasar, (i) jaminan ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi secara merata pada masa musim tanam, serta kemudahan dalam akses permodalan yang mendukung telaksananya usaha petani, (j) Perlu sosialisasi yang terus menerus kelebihan bibit dan benih unggul bersertifikat sehingga petani sadar akan nilai ekonomi yang lebih tinggi, (k) Perlunya peran maksimal dari para penyuluh pertanian untuk memberikan penjelasan bagi masyarakat akan keunggulan pola tanam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, Badu. 2018, *Service Innovation In Local Government: Analysis Of Business Information Services in South Sulawesi Province, Indonesia*, Mediterranean Journal Of Social Sciences, Vol. 9 Number 3 p..217-224.
2. Hadiwinata, Bob, S. 2007, *Good Governance: Konsep dan Teori. Reading Material: Demokrasi Sivil Society*, Bandung. Unpad.
3. Rondinelli, A. Dennis & Cheema G. Shabbir, 2007. *Decentralizing Governance, Emerging Concepts and Practices*. Washington, D.c.Brookings Institution Press.
4. Bhatta, Gambhir, 1996. *Capacity Building at The Local Level For Effective Governance, Empowerment Without Capacity is Meaningless*.
5. Kooiman, Jan, (1999). *Modern Governance: New Governance-Society Interaction*, New Delhi. London Trusand Oaks.
6. Suhady, Idup & Pernada Desi, 2005. *Dasar-Dasar Good Governance*, Jakarta ,Lembaga Administrasi Negara.
7. Lawson, Ben & Samson, Danny (2001). *Developing Innovation Capability in Organization: A Dynamic Capabilities Approach*. International Journal of Innovation Management Vol. 5 No. 3 Imperial College Press, p. 377-400.
8. Kholilulloh, Ibrahim M., 2013. *Kapasitas Inovasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Dalam Program Pertanian Terpadu Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol, 1 No. 1. Hal. 137-148
9. Atoche, Carlos. 2007, *Capability Lifecycle: An Insight from The Innovation*, College Of Business Administration, Florida International University, Mami, p.1-11.
10. Baldwin, John K. 1999, *innovation, Training and Success, Working Paper Series*, Micro Economic Analysis, Division Canada Number. 137.
11. Meiwanda, Geovani, 2016. *Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.. 19 No. 3 pp. 251-263.
12. Shapiro, Stephen, M. 2002. *Innovation: A Blue Print for Surviving And Thriving in an Age of Change*. New York. Mc-Graw Hill.
13. Lustiadi, Yudi, 2016. *Kapabilitas Organisasi Publik Pasca Pemekaran Daerah: Studi pada Organisasi Pemberi Layanan Dasar di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 1. Hal. 76-82.
14. Tricahyadinata, Irsan, 2013. *Kapabilitas Inovasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jurnal Akuntabel, Vol. 10 No. 1, Hal. 1-18.
15. United Nation, 2007. *Innovation in The Public Sector Compendium of Best Practices: Winner of The United Nation Public Services Award 2003 to 2005*, ST/ESA/PAD/SER.E/64
16. Sangkala, 2013. *Innovative Governance: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta , Capiya Publishing.
17. Rogers, E.M. 2003. *Diffusion of Innovation*, 5th Edition, New York.The Free Press.
18. Osborne dan Gaebler , 1992. *Reinventing Government:How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: A Willian Patrick Book.
19. Irwan, Noor, 2013. *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*, Malang, UB-Press.

20. Farazman, Ali. 2004. *Sound Governance: Policy and Administrative Innovation*, London: Praeger.
21. Tang Abdullah, M. 2016. *Inovasi Pemerintahan Daerah: Studi Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gowa*, FIA Universitas Brawijaya,
22. UNDESA, 2005. *Aide-Memorie. Ad Hoc Expert Group Meeting on "Approaches and Methodologies for The Assessment and Transfer of best Practices in Governance and Public Administration*.
23. Halvorsen, T. Johan H. Ian M. & Rannveig R. 2005. *On The Differences Between Public and Private Sector Innovation*. Publin Report D9. Oslo: NIFU STEP.
24. Albury, D. 2005. *Fostering innovation in Public Service*, Publik Money and Management, Vol. 25, Number 1 January 2005, pp 51-56.
25. Robbins, Stephen P. 2007. *Organizational Behavior, 12th edition*, New Jersey, Prentice Hall.
26. UN-Dubay Municipality, 2003. *Dubai International Award for Best Practices to Improve the Living Environment*, Submission Guide and Reporting Format for Year 2004.
27. Miles, Mathew, B. and Michael A. Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta, UI.Press.
28. Kusumasari, 2014, *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*, Yogyakarta: Gava Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian

Tahun 1 Total Rp. 136,812,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	1	1,000,000	1,000,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	1	5,000,000	5,000,000
Analisis Data	Penginapan	OH	2	500,000	1,000,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	5	105,000	525,000
Analisis Data	Uang Harian	OH	24	300,000	7,200,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	24	40,000	960,000
Bahan	ATK	Paket	1	2,500,000	2,500,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	1	3,000,000	3,000,000
Bahan	Barang Persediaan	Unit	4	1,000,000	4,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	1	1,000,000	1,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar internasional	Paket	1	5,000,000	5,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	7,000,000	7,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Luaran Iptek lainnya (purwa rupa, TTG dll)	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya penyusunan buku termasuk book chapter	Paket	1	11,000,000	11,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	10	105,000	1,050,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya konsumsi rapat	OH	10	40,000	400,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	2	900,000	1,800,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	3	2,500,000	7,500,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	6	105,000	630,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	18	300,000	5,400,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	18	450,000	8,100,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	24	400,000	9,600,000

Pengumpulan Data	Uang harian rapat di luar kantor	OH	50	105,000	5,250,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	50	40,000	2,000,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	750	40,000	30,000,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	4	2,500,000	10,000,000
Sewa Peralatan	Peralatan penelitian	Unit	10	389,700	3,897,000
Total Anggaran Biaya Peneleitian yang di setujui Seratur tiga puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)					136.812.000

Lampiran 2 : Dukungan Sarana dan Prasarana Penelitian

Sarana dan prasarana yang di Universitas Hasanuddin adalah perpustakaan, dan e-library. Demikian pula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Administrasi memiliki perpustakaan yang menyediakan literature, dan jurnal. Selain Departemen Ilmu Administrasi memiliki Laboratorium Kebijakan Publik sebagai sarana membahas langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di dalam laboratorium tersebut disediakan LCD dan komputer PC dan alat tulis lainnya.

Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti

No.	Nama	Instansi Asal	Bidang Keahlian	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Badu, M.Si 0031126256	UNHAS	Manajemen Publik	20	Membuat/merevisi proposal, menyusun instrument penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data serta menulis laporan akhir
2	Prof. Dr. Rakhmat, M.S. 0020056308	UNHAS	Manajemen Publik	15	Nara sumber, Pengumpulan data lapangan, dan analisis data, penulisan laporan, dan penulisan artikel jurnal internasional bereputasi.
3	Andi Ahmad Yani, S.Sos. M.Si. 0023107603	UNHAS	Administrasi Publik	15	Menyusun proposal penelitian, Menyusun Instrumen pengumpulan data, mengumpulkan data lapangan, pengolahan data, analisis data, menulis laporan hasil penelitian dan penyusunan artikel jurnal internasional bereputasi

Lampiran 5 Biodata Ketua dan anggota

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS DIRI (Ketua)

1.1	Nama Lengkap	Dr. H. Badu, M.Si.
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
1.3	NIP	196212311989031028
1.4	NIDN	0031126256
1.5	Tempat dan tgl lahir	Tetewatu-Soppeng, 31 Desember 1962
1.6	Alamat Rumah	Perumahan UNHAS, Jl. Arsitektur IV Blok D. 44 Antang
1.7	No. Tlp/Fax	--
1.8	No. HP	085342516246, 082290467770
1.9	Alamat Kantor	Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar
1.10	No. Tlp/Fax	0411-585024
1.11	Alamat email	baduahmad7@gmail.com
1.12	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 150 orang S-2 =60 orang S-3= 20 org
1.13	Mata Kuliah yang diampu	
		1. Azas-Azas Manajemen (S1)
		2. Pelayanan Publik (S1)
		3. Pengambilan Keputusan (S1)
		4. Manajemen Perubahan (S1)
		5. Manajemen Pengetahuan (S1)
		6. Manajemen Kewirausahaan (S1)
		7. Electronic Governmet (S1)
		8. Filsafat Administrasi (S2)
		9. Ekonomi Politik (S2)
		10. Metode Penelitian Administrasi (S3)
		11. Seminar Manajemen Publik (S3)

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S1	S2	S3
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu/Keahlian	Administrasi Negara	Administrasi Pembangunan	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1982 – 1988	1991 – 1994	2006 – 2009
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Sistem Informasi Akademik di Universitas Hasanuddin	Analisis Tentang Hubungan Motivasi Terhadap Kepuasan dan Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil, di Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan	Studi Eksploratif Dimensi-Dimensi Disiplin Pembelajaran Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar

Nama Pembimbing/ Promotor	Drs. J. Daniel	Drs. H. Achmad Batinggi, M.P.A	Prof. Dr. J. Salusu, MA.
---------------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------

III. PENGALAMAN PENELITIAN SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2009	Kajian Perencanaan SDM aparatur Di kabupaten Mimika.	Pemda Mimika	90.000.000
2	2009	Kajian Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dan Latihan (Diklat) Di Kawasan Timur Indonesia	LAN RI	250.000.000
3	2011	Analisis Kompetensi dan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Pemkot Makassar	Hibah Dikti	45.000.000
4	2012	Analisis Hubungan Kompetensi Dengan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Pemkot Makassar.	Hibah Dikti	70.000.000
5	2013	Kajian tentang pemanfaatan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Takalar	BOTN	50.000.000
6	2013	Model Peningkatan Kinerja Organisasi Melalui <i>Learning Organization</i> (Studi Kasus Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Makassar)	BAPPEDA Kota Makassar	45.000.000
7	2014	Analisis Pemanfaatan E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Di Kabupaten Bantaeng	BOPTN	80.000.000
8	2014	Model Inovasi Pelayanan Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	BAPPEDA Kota Makassar	45.000.000
9	2016	Peningkatan Kualittas Pembelajaran Dengan Pendekatan Experiential Learning dan Faster Learning	BOPTN	9.500.000
10	2016	Metode Analisis Border Community Security Index (BCSI)	RUNAS	100.000.000
11	2016	Model Pengelolaan Kebersihan Berbasis Kemitraan di Kota Makassar	BMIS	48.500.000
12	2017	Inovasi Pelayanan Izin Usaha di Sulawesi Selatan (Tahun I)	UPT	130.000.000
13	2017	Konflik Antar Organisasi Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Makassar	RUNAS	50.000.000
14	2017	Analisis Jabatan Struktural Pemerintah Kota Jayapura	PEMKOT JAYAPURA	240.000.000
15	2018	Inovasi Pelayanan Izin Usaha di Sulawesi Selatan (Tahun II)	UPT	160.000.000

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2009	Pemantau Ujian Nasional di MAN Baraka Kabupaten Enrekang	Diknas	3.000.000
2	2009	Melakukan sosialisasi penerapan PP 38 dan 41 Tahun 2007, tentang Urusan dan Kelembagaan Instansi pemerintah di depan Anggota Legislatif, dan eksekutif di Kabupaten Takalar.	Pemda Takalar	5.000.000
3	2009	Tim Penyusun kelembagaan sesuai PP 38 dan 41 Tahun 2007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.	Pemda Takalar	20.000.000
4	2009	Tim Penyusun kelembagaan sesuai peraturan pemerintah (PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.	Pemrov Sulsel	20.000.000
5	2010	Pemantau Ujian Nasional di SMA 11 Makassar	Diknas	3.000.000
6	2011	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Bajeng, Kabupaten Gowa	Hibah Dikti	3.000.000
7	2011	Detaser Dikti selama 5 (lima) di Bulan di Universitas Batanghari Jambi Provinsi Jambi	Dikti	50.000.000
8	2012	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Lapri, Kabupaten Bone	Diknas	3.000.000
9	2013	Pemantau Ujian Nasional di SMA 1 Batu-Batu, Kabupaten Soppeng	Diknas	3.000.000
10	2014	Pelatihan Pengelolaan Arsip di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	BOPTN	25.000.000
11	2015	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kec. Mandai Kabupaten Maros	BOPTN	25.000.000
12	2016	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa	BOPTN	19.500.000
13	2017	Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros	BOPTN	18.500.000
14	2018	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Aparatur Pemerintah di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).	BOPTN	17.500.000

**V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL SELAMA
5 TAHUN TERAKHIR**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	"Kajian Teoritik: Perspektif Learning Organization Dalam Institusi Pemerintahan,	Jurnal Administrasi Publik	Vol. V, Maret. 2009
2	" Kajian tentang Strategi Membangun Organisasi Pembelajar di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar,	Jurnal Administrasi Publik	Vol. VI, Juni. 2010
3	"Kajian Sistem Administrasi Kearsipan Pemerintah Kota Makassar.	Jurnal Administrasi Publik	Vol VII No. 3, September 2011
4	"Analisis Kompetensi dan Kinerja Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Pemkot Makassar,	Jurnal Ilmu Sosial dan Huminiora	2012
5	"Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Hasil Bagi Pengangkatan Pegawai Honorer Menjadi PNS di Lingkungan Kota Makassar.	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik	Volume X No. 1/Juni 2014
6	Analysis of Appoitment and Placement of Official in Position of Women in the Secretariat of Structural South Sulawesi Province	Journal Of Research in Humanities and Social Science	Volume 3-Issue 8 (2015)
7	Transformation of The Public Service Orgnizationin the Lecennsing Service Agency and Investment in Bau-Bau City	International Journal of Scientific and Research Publication (IJSRP)	Volume 5-Issue 7, July 2015
8	Model Relationship Officer of Bureaucracy and Political Officieal in the Government of Papua (A Study on the Placement of Officieals Structrally Echelon II)	International Journal of Scientific and Research Publication (IJSRP)	Volume 6-Issue 9, September 2016
9	The Performance Model Analysis of Makassar Government Secretariat in Learning Organization Perspective	Sci.Int (Lahore), 29 (1)	Special Issue, 2017. ISSN 1013-5316; CODEN: SINTE 8
10	The partnership of Maritime Toursm Management in Kapoposang Island Pangkajene Regency	Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan	Volume 33 No. 1 (June 2017)
11	Waste Management Model Based on Partnership in The Coastal Areas of Makassar City Indonesia	International Journal of Business and Management 1 (1)	RMP Publications, 2017

12	Service Innovation In Local Government: Analysis Of Business Information Services in South Sulawesi Province, Indonesia	Mediterranean Journal Of Social Scinces	Vol.9 No. 3 May 2018, ISSN 2039-9340 (print), ISSN 2039-2117 (online)
-----------	---	---	---

VI. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (ORAL PRESENTATION) DALAM 5

TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Internasional Seminar “On ndonesian Fisheries Development: Enhancing Fish Internasional Market”	The Strategic Leadership Of Learning Organization Approach In The Resources Sustainable Management Of Marine And Fisheries	2010, Universitas Hasanuddin, Makassar
2	Seminar Kebijakan Pelayanan Publik	Manajemen Kearsipan: Implementasi Undang-Undang 25 Tahun 2009, tentang Kearsipan	2010, Disajikan di Pemkab Maros
3	International Seminar “ Democracy and Election: Solution for Establishing Good Governance”.	The inovation of lisencing services to increase The local revenue (PAD) .	2015, Universitas Hasanuddin, Makassar
4	2 nd International Conference on Business and Engineering Research.	The Performance Model Analysis of Makassar Government Secretariat in Learning Organization Perspective	Osaka, Japan, 2016
5	International Conference on Multidisciplinary Reseach. Theme: Earthing Knowledge Strengthening Connectivity	Analisis Pemanfaatan E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bantaeng	Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016

5	International Conference on Administrative Science “Challenges of Public Administration in Developing Countries”	Analysis of Business Information Services Innovation in Bantaeng, South Sulawesi	Hasanuddin University, Makassar, 2017
6	The International Conference on Governance, Public Administration and Social Sciences (ICoGPASS)	The Impact Of Business Information Services In Makassar City, Indonesia	Yogyakarta, 2018

VII. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit/ISBN
1	Edisi II: Revisi Modul Manajemen Pelayanan Umum (1-9 Modul)	2009	306	UT Press
2	Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik	2012	302	Lephas Press
3	Buku Ajar E-government	2013	134	Lephas Press
4	Buku Ajar Manajemen Kewirausahaan	2013	145	Lephas Press
5	Buku Teks Manajemen Pelayanan Publik	2013	282	Andi, Yogyakarta
6	Buku Ajar Manajemen Perubahan	2015	136	Foto Copy
7	Buku Ajar Manajemen Kewirausahaan (Revisi)	2016	186	Lephas Press
8	Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik (ISBN)	2018	222	Phinatama Media, Makassar
9	Buka Nasional: Pelayanan Publik: Teori dan Praktek, ISBN 978-602-50508-8-6	2018	229	Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung

VIII. PENGALAMAN PEROLEHAN HAKI

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Buku/Pelayanan Publik: Teori dan Praktek	2018	Hak Cipta	000112478

IX. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN

No.	Tahun	Tema	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	2009	Restrukturisasi organisasi	Pemerintah Kabupaten Takalar	Baik
2.	2009	Restrukturisasi organisasi	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Cukup Baik
3.	2013	Model Peningkatan Kinerja Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Makassar	Cukup Baik
4	2014	Model Pelayanan Perizinan Kota Makassar	BPTPM Kota Makassar	Baik
5	2014	Analisis Jabatan Struktural	Pemerintah Raja Ampat	Sangat Baik
6	2017	Analisis Jabatan Struktural dan Analisis Beban Kerja	Pemerintah Kota Jayapura	Sangat Baik

X. PENGHARGAAN YANG PERNAH DIRAIH

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Dosen Tauladan Tingkat Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin	Dekan Fisip Unhas	2002
2	Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya dari Presiden RI, Sebagai Tenaga Edukasi Departemen Pendidikan Nasional Republik selama 10 Tahun.	Presiden Republik Indonesia	2004
3	Penghargaan Atas Kontribusi Dalam Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018	Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan	2018

XI. KUNJUNGAN LUAR NEGERI

1. Diskusi Panel Tata Kelola Pemerintahan di Pusat Pemerintahan Malaysia di Putra Jaya Kuala Lumpur, Tahun 2013
2. Focus Group Discussion Tenaga Kerja di Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Tahun 2013
3. Survey Lapangan Pusat Pengolahan Hasil-Hasil Pertanian Provinsi Shangkala Kerajaan Thailand, Tahun 2013
4. Pusat Pengembangan Industri Menengah dan Kecil di Singapura, Tahun 2013
5. Conference International Osaka-Japan Tahun 2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hanya ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Makassar, 05 Juni 2020

Dr. H. Badu, M.Si.
NIP 196212311989031028

CURICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

1. Nama dan Gelar : **Prof. Dr. Drs. Rachmat, MS**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pare-Pare, 20 Mei 1963
3. Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IV.e
4. NIP : 196305201987021002
5. Pekerjaan : Dosen FISIP dan Pascasarjana Unhas
6. Jabatan : **Ketua Program Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Hasanuddin**
7. Bidang Keahlian : Administrasi dan Kebijakan Publik
8. Agama : Islam
9. Jenis Kelamin : Laki-Laki
10. Status Perkawinan : kawin
11. Alamat rumah : The Amaryllis Residence (Jln Amaryllis Azalia 11), Jln Metro Tanjung Bunga, Makassar-90225
12. E-mail : hrakhmat63@gmail.com
13. Mobile : 0811446465/ 081220206465

B. Pendidikan

1. SD Negeri 12 Pare-Pare 1974
2. SMP Negeri 3 Pare-Pare 1977
3. SMA Negeri 2 Pare-Pare 1981
4. Sarjana (Drs) Administrasi Negara, Fisip Universitas Hasanuddin, Makassar, 1986
5. Megister Sains (MS) Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1991
6. Doktor (Dr) Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2004

C. Pelatihan Dalam dan Luar Negeri

1. **Visiting Reseacher**, di Keo University, **Jepang, 2015**
2. **Training on Public Responsibility and Development**, Northen Illinois University, Amerika Serikat, 2012
3. **Training on Strategic and Method of regional Development Planning**, DSE-Jerman, Berlin, 1996

4. **workshop on Case Study Writing Policy Development and Administration**, University of The Philippines, Filipina, 1995

D. Pengalaman Jabatan

1. Ketua Program Diploma III Kearsipan FISIP Unhas, 1992-1995
2. Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP), Unhas, 1995-1997
3. Kepala Bidang Pendidikan STIA LAN Makasar 1997-1998
4. Kepala Bidang Litbang LAN Perwakilan Sulawesi Selatan, 1998-1999
5. Kepala Bidang Kajian Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur LAN Perwakilan Sulawesi Selatan, 1999-2000
6. Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIA LAN, 2000
7. Pembantu Dekan I Bidang Akademik FISIP Uhas, 2000-2003
8. Ketua Program Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu, 1999-2001
9. Ketua Program Magister Manajemen Kebijakan Publik Program Pascasarjana Unhas, 2005-2010
10. Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Depdikbud, untuk Program Magister dan Doktor Ilmu Administrasi, 2007-Sekarang
11. Penasehat/Staff Ahli Walikota Makassar, 2008-Sekarang
12. Penasehat/Staff Ahli Gubernur Sulawesi Selatan, 2016-Sekarang

E. Pengalaman Ceramah Ilmiah

1. Percepatan Demokrasi Birokrasi, **Pidato Dies**, Disampaikan Dalam Rangka Dies Natalis ke-31, STIA Bina Banua Banjarmasin, 2013
2. Manajemen Kebijakan Publik, **Kuliah Umum**, pada Program Magister Ilmu administrasi, Pascasarjana Universitas Mulawarman, Samarinda 2012
3. Sistem dan Proses Kebijakan Publik, **Kuliah Umum**, disampaikan dihadapan Civitas Akademika Universitas Negeri Marauke, Marauke-Papua, 2011
4. Transformasi Birokrasi Publik, **Kuliah Umum**, pada Program Doktor Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas 17 Agustus Surabaya, 2010
5. Paradigma Baru Administrasi Publik, **Kuliah Umum**, Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu 2009
6. Pengembangan Kurikulum Ilmu Administrasi Publik Berbasis Kompetensi disampaikan pada **Semiloka** Penyusunan Kurikulum FISIP Universitas Tadulako, Palu, 2009
7. Revitalisasi Birokrasi Pemerintah, **Orasi Ilmiah** disampaikan pada Wisuda dan Dies Natalis ke-8 Universitas Tompotka, Luwuk, Sulawesi Tengah 2008

8. Reformasi Administrasi dan Good Governance, **Orasi Ilmiah** disampaikan pada Wisuda dan Dies Natalis ke-47 STFISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan 2007
9. Reformasi Administrasi Publik, Paper disampaikan pada **Seminar Nasional** Pembangunan Administrasi STIA LAN Makassar, 2007
10. Dinamika Proses Kebijakan Publik, **Ceramah Pakar** disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II, Lembaga Administrasi Negara, 2005-sekarang
11. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, **Seminar Nasional**, Universitas Tadulako, Palu 03 Mei 2016

F. Publikasi Ilmiah

1. **Administrasi dan Akuntabilitas Publik**, Yogyakarta, Andi. 2018 (Buku)
2. **Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan**, Yogyakarta. Graha Ilmu. 2013 (Buku)
3. **Teori Administrasi dan Manajemen Publik**. Jakarta. Pustaka Arief. 2009. (Buku)
4. **Revitalisasi Birokrasi Dalam Perspektif Governance**, Jurnal Administrasi Reform Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Mulawarman, ISSN :2266, Samarinda, 2013
5. **Akuntabilitas Birokrasi Pemerintah Dalam Pelayan Publik**, Jurnal Sosial Publik, Fisip Universitas Haluleo (Terakreditasi Dikti, ISSN : 0853-2257), Kendari, 2006
6. **Desentralisasi dan Administrative Capability**, Jurnal Administrasi Publik, (terakreditasi LIPI, ISSN : 1858-2166), Jakarta, 2005

G. Pengalaman Mengajar

1. Mengajar pada **Program Doktor administrasi Publik**, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2006-Sekarang
2. Mengajar pada **Program Doktor Ilmu Sosial**, Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih Papua, 2004-Sekarang
3. Mengajar pada **Program Magister Administrasi**, STIA LAN Makassar, 2006-Sekarang
4. Mengajar pada **Program Magister Administrasi Publik**, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011-Sekarang
5. Mengajar pada **Program Magister Administrasi Publik**, Program Pascasarjana STIA Bina Taruna Gorontalo, 2010-Sekarang
6. Mengajar pada **Program Magister Administrasi Publik**, Program Pascasarjana IISP-YAPIS, Biak Papua, 2016-Sekarang

H. Penghargaan

1. Alumni Terbaik Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 1991
 2. Dosen Teladan Universitas Hasanuddin, 1994
 3. Satyalencana Karya Satya 10 Tahun dan 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia
- s

Makassar, 27 Februari 2019



Prof. Dr. Drs. Rakhmat, MS

Lampiran 6 Surat pernyataan ketua

Dokumentasi Penelitian di Kabupaten Bantaeng, 2020

Wawancara Mendalam Bersama Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng



FGD Bersama Kepala Tekhnopark dan Para Penyuluh Pertanian



Teknologi Pembibitan Kentang Unggul Bersertifikat



Perkembangan Bibit Kentang Unggul Bersertifikat



Pemilahan Bibit Kentang



Tanaman Kentang Unggul Bersertifikat



Tanaman Bawang Merah Unggul Bersertifikat



Bibit Bawang Putih



Benih Padi Unggul Bersertifikat



Tanaman Padi Unggul Bersertifikat



Teknologi Pengetasan Ayam Kampung



Budidaya Ayam Kampung



Ayam Petelur

